

**DAMPAK PERDAGANGAN KOPRA TERHADAP  
EKONOMI MASYARAKAT DI BULUKUMBA**

**1952-1960**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	23-09-2004
Asal Dari	Fakul Sastra.
Banyaknya	2 (dua) Exp
Harga	Hadiah.
No. Inventaris	040323 155
No. Pias	18683

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra  
Pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin

Oleh :

**ANDI BUSTAN AK**  
F 811 99 003



**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2003**

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

HALAMAN PENGESAHAN

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor: 2279/J04.10.1.6/PP.27/2003. Tanggal 18 Juli 2003 dengan ini kami menyatakan dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan pada tim penguji.

Makassar, Desember 2003

Konsultan Pertama



DR. Edward L. Poelinggomang.

Nip.131 430 495

Konsultan Kedua



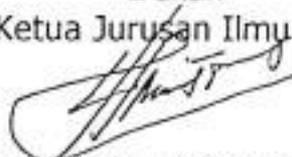
Dra. Nahdia Nur, M.Hum.

Nip.132 215 512

Di setujui untuk diteruskan kepada panitia ujian skripsi.

Dekan

u.b. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah.



DR. Edward L. Poelinggomang.

Nip. 131 430 495

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS SAstra**  
**JURUSAN SEJARAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal 26 Desember 2003, Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik. Skripsi yang berjudul : "DAMPAK PERDAGANGAN KOPRA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI BULUKUMBA. 1952 - 1960". Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Maret 2004

Panitia Ujian Skripsi :

- |                                    |              |         |
|------------------------------------|--------------|---------|
| 1. Prof. Dra. Marrang Paranoan, MS | K e t u a    | (.....) |
| 2. Dra. Djah Kusmarini             | Sekretaris   | (.....) |
| 3. Drs. Daud Limbugau. SU          | Penguji I    | (.....) |
| 4. Margriet Lappia Mokka, S.S.     | Penguji II   | (.....) |
| 5. Dr. Edward L. Poellingomang     | Konsultan I  | (.....) |
| 6. Dra. Nahdia Nur. M.Hum          | Konsultan II | (.....) |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis Akhir ini, Skripsi yang diberi judul "Dampak Perdagangan Kopra Terhadap ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bulukumba Tahun 1952-1960". Merupakan salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Setiap usaha yang berhasil pastilah merupakan hasil kerja keras yang tak mengenal menyerah dan putus asa serta tentunya tidak lepas dari bantuan, dorongan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak, demikian pula selama penulis menyelesaikan karya tulis akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus terkhusus kepada Ayahanda H. M. Amran Kantao dan Ibunda H.S. Mariyati Marsuki yang dengan cinta, kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanannya telah mengasuh, membimbing, mendidik, membiayai dan senantiasa berdoa demi tercapainya cita-cita ananda, juga kepada adikku yang tersayang Andi Afriani AK, Andi Harfina AK, Andi Rosmini AK.

Kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberinya bantuannya selama ini Bapak Lompa dan mama Ufe, Adik Ama (Abdul Salam), Adik Ila juga yang terkasih adik Nur Hidayah serta H. Marsuki dan Nenek H. Juheria.



Kehadiran dan keberadaan kalian telah memberi motivasi tersendiri bagi penulis selama ini.

Selanjutnya penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edwar L. Poclinggomang, M.A. sebagai Konsultan I dan Drs. Suriadi Mappangara, M.Hum sebagai konsultan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Akademik Fakultas Sastra Unhas, terkhusus untuk Ibu Ekster.
3. Kepada dan Seluruh Staf Arsip Nasional Makassar.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Sastra Khususnya anak-anak Sejarah: Yanto Dekopris, Muh. Amri.
5. Sahabat-sahabatku di Sinjai (anak-anak Mekar Jaya) terima kasih buat Ambo, Rahman, Tamin, Muslimin, M.Said, Rudy, Sule, Ady, Juslan, Ullang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Sehubungan dengan itu penulis membuka diri untuk menerima koreksi dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan skripsi ini.



Semoga karya ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat menambah cakrawala keilmuan khususnya ilmu sejarah, semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi kita amin.

Makassar, Oktober 2003

Andi Bustan, AK

## Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan Evaluasi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Masalah dan Batasan Masalah	8
D. Metodologi	10
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba.	14
A. Sejarah Pembentukan Wilayah.	14
B. Keadaan Geografi.	17
C. Keadaan Sosial Budaya.	20
D. Keadaan Ekonomi Sebelum Tahun 1952.	24
BAB III Proses Perdagangan Kopra Di Bulukumba.	30
A. Sistem Perdagangan Kopra Di Bulukumba.	30
B. Pengolahan Kelapa Menjadi Kopra.	38
C. Faktor-faktor Penyebab Merosoknya Usaha Kopra.	40
D. Bentuk Pemasaran dan Jaringannya.	42

BAB IV Dampak Perdagangan Terhadap Ekonomi Masyarakat.	50
A. Dampak Positif.	53
B. Dampak Negatif.	55
C. Perkembangan Terakhir Ekonomi Bulukumba.	56
BAB V Penutup.	68
A. Kesimpulan.	68
B. Saran.	69
Daftar Pustaka	
Daftar Arsip	
Lampiran	
Peta Dati II Bulukumba.	

## ABSTRAK

Di Sulawesi Selatan termasuk daerah penghasil kopra di Indonesia olehnya itu dia menyandang predikat sebagai pengeksport utama kopra keluar negeri yang berpusat di Makassar dan terkhusus di Sulawesi Selatan ini daerah Bulukumba termasuk salah satu penghasil kopra yang banyak diangkut ke Makassar. Selanjutnya masyarakat Bulukumba dalam menanggapi keberadaan komoditi kelapa sebagai Bahan baku kopra sangat gembira terbukti dengan banyaknya areal kebun kelapa.

Namun sejalan dengan perkembangan perdagangan kopra tersebut mempunyai dampak yang harus dihadapi oleh masyarakat sekitar dimana masyarakat yang bertujuan ingin mencapai mendapatkan sedikit tambahan penghasilan dalam hal ini perbaikan nasib. Malahan lebih banyak dirugikan dan ditiup. Ditambah lagi dengan keberadaan gerombolan DI/TII.

Dengan pemahaman tersebut di atas maka penulis akan mencoba menelusuri secara khusus dengan memperkecil lingkup wilayahnya yaitu dampak perdagangan kopra terhadap kehidupan masyarakat Bulukumba (1952-1960) tujuan kajian ini adalah untuk menyoroti keadaan sosial ekonomi sehubungan dengan adanya komoditi ekspor kopra tersebut. serta dampak yang ditimbulkannya.

Hasil studi menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat Bulukumba lebih banyak kerugian ketimbang yang mendapat keuntungan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah perekonomian dalam hal ini perdagangan suatu wilayah dan dalam kurun waktu yang tertentu masing-masing mempunyai ciri khas atau fenomena masing-masing yang menarik untuk dikaji khususnya oleh para sejarawan. Begitupun halnya dengan proses ekonomi yang terjadi di Bulukumba sebagai salah satu Kabupaten dari Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan hasil pembentukan dari rapat Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI).<sup>1</sup>

Menyikapi hal diatas di Kabupaten Bulukumba ini di tahun 1952-1960 pernah ada satu jenis komoditi ekspor yang sangat diminati oleh masyarakat atau pedagang besar atau kecil. Komoditi tersebut adalah Kopra. Jenis komoditi ini mulai populer di Indonesia pada abad ke-19 sampai abad ke-20an bahkan di benua Eropa.<sup>2</sup>

Kajian mengenai komoditi ekspor ini tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen pendukung utamanya peranan petani sebagai produsen, pedagang sebagai distributor dan penguasa sebagai penentu kebijakan. Dalam hal peranan petani dalam perdagangan sebagai suatu proses ekonomi dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin agar mampu

<sup>1</sup> Kementerian Penerangan Propinsi Sulawesi, *Departemen Penerangan RI*, (Jakarta, 1953) hal. 6.

<sup>2</sup> Arsip Bulukumba, tahun 1930-1960, Reg. No. 106.



menyediakan hasil produksi dengan mutu yang sesuai dengan keinginan para pelaku ekonomi dan penguasa. Diangkatnya perdagangan kopra dalam tulisan ini karena produk inilah yang mendominasi perdagangan di Sulawesi pada umumnya dan secara umum proses tata niaga kopra ini begitu mempengaruhi struktur perekonomian nasional Indonesia.

Studi masalah perdagangan kopra di Bulukumba adalah salah satu hal yang menarik terutama seringnya terjadi penyelundupan kopra secara besar-besaran dari masyarakat guna pemenuhan kebutuhan dan mencari kekayaan pribadi dan adanya masyarakat yang punya perkebunan kelapa serta terlihat langsung dalam perdagangan kopra itu sendiri dengan distributor orang-orang Tionghoa dan KPN.

Pada akhir tahun 1950-an keadaan sosial ekonomi diwarnai dengan kemiskinan dimana pada masa itu perdagangan mengalami depresi akibat menurunnya harga kopra. Dan pada tahun 1955 merupakan awal munculnya gerombolan DI/TII jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian desa. Jalan raya yang merupakan urat nadi perekonomian pedesaan dirusak oleh pemberontak untuk menghambat gerakan tentara yang berakibat arus lalu lintas barang dan jasa terpengaruh. Perbedaan harga barang antara satu tempat dengan tempat lain jauh berbeda. Hal ini

<sup>2</sup> Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960, Vol. IX, Reg. No. 628

disebabkan jarak dan waktu tempuh perjalanan sangat lama juga resiko dalam perjalanan yang kadang-kadang terjadi perampokan.<sup>4</sup>

Nanti ada perubahan di sektor ekonomi pada masa berakhirnya gerombolan DI/TII di Tana Lemo pada tahun 1964 merupakan era baru pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Bulukumba pada khususnya. Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi yang porak-poranda, maka pemerintah mulai membangun kembali sarana perekonomian, kegiatan tersebut ditingkatkan dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dilaksanakan sejak 1 April 1969.<sup>5</sup>

Di kaitkan dengan masalah kopra, komoditi yang satu ini adalah salah satu komoditi perdagangan pada masa penjajahan Belanda (sekitar abad ke 19) dan maupun pada masa transisi Orde Baru sampai sekarang, singkatnya kopra adalah salah satu komoditi yang diincar oleh para pedagang besar ataupun kecil dalam rentang waktu tersebut di atas dan dilanjutkan hingga sekarang. Selanjutnya di awal tahun 1963 sudah bisa dikatakan perbaikan perekonomian masyarakat khususnya petani kelapa sudah hidup berkecukupan terbukti dengan hasil perdagangan kopra

---

<sup>4</sup> Syahrul Amar "Kehidupan Nelayan Pembuat Perahu di Tana Lemo Kab. Bulukumba", (Makassar, Skripsi Fak. Sastra Unhas, 1992), hal. 88.

<sup>5</sup> Amirullah, "Gerakan Gerilya Serta Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Bulukumba", (Makassar Skripsi Fakultas Sastra Unhas, 2001) hal. 33.

yang di ekspor sekitar 218.600 kg dan hasil pertanian yang dicapai 124.600 kg ke Makassar.<sup>6</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Kabupaten Bulukumba terkenal sebagai daerah penghasil kelapa olehnya itu daerah ini merupakan pemasok kopra ke Makassar sekitar tahun 1952 yang terbesar di Sulawesi Selatan sampai tahun 1958, predikat itu sangat menarik untuk dikaji terutama mengenai pertumbuhan produksi kelapa dan ekonomi petani kelapa. Perhatian pada komoditi kelapa menarik berdasarkan pernyataan Kuntowijoyo, bahwa sejarah ekonomi mengenai sebuah komoditi yang merupakan bagian dari penjelasan mengenai pertumbuhan dan bagian penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan perjalanan sebuah lokalitas dari tahap ke tahap merupakan tema yang menarik.<sup>7</sup> Sementara Brooks Adam menyatakan bahwa kajian sejarah ekonomi akan menjadi penting apabila yang dikaji adalah mengenai sejarah perdagangan.<sup>8</sup>

Tanpa mengabaikan kedua hal di atas, penulis berusaha meneliti dan mengungkapkan sebagai tema utama dengan menetapkan spesial

---

<sup>6</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, (Arsip Propinsi Sulawesi Selatan 1950-1960) No. Reg. 627.

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Jogja; 1994), hal. 87.

<sup>8</sup> Edward L. Poelinggowang, "Sejarah Perkembangan Kolonial Rujukan Bagi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Bagian Timur", (Makassar : Makalah Ceramah Ilmiah Kesejarahan dan Kepurbakalaan di Gedung Pertemuan Ilmiah Unhas, tanggal 12 Juli 1993), hal. 13.

studi ini di daerah Bulukumba pada kurun waktu 1952-1960. Pada tahun 1945 - 1952 Ekonomi, peran dan gerilya : pembumihangusan prasarana ekonomi yang dikenal dengan nama ekonomi dualistik, dimana masa ini berbagai prasarana ekonomi dibumihanguskan oleh rakyat dan tentara gerilya yang dimaksudkan agar ekonomi dan politik penjajah bisa kacau, sistem dualistik ini muncul oleh adanya dominasi ekonomi penjajah yang berpusat pada perkebunan dan perdagangan yang hanya berpusat di Jawa dan Sulawesi Selatan.

Tahun 1953 – 1956 pembangunan ekonomi nasional, adanya kelahiran berbagai perusahaan negara hasil pengambilalihan dari peristiwa politik dan ekonomi yang selanjutnya adalah pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan awal munculnya DI TII di Bulukumba.

Tahun 1957-1959 diwarnai juga dengan terjadinya pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan perjuangan semesta (Permesta) di Sumatera dan Sulawesi Selatan.

Tahun 1959-1960 terjadinya perubahan di beberapa sektor ekonomi khususnya yang menyangkut perdagangan ekspor dari hasil bumi dan pertanian di Jawa dan Sulawesi Selatan terutama daerah penghasil kopra.<sup>9</sup>

Oleh karena itu berbicara mengenai perdagangan kopra, kita harus kembali ke Dinamika masa lampau kapan masyarakat Sulawesi Selatan

---

<sup>9</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, LP3ES, 1988), hal. 7.

pada umumnya dan Kabupaten Bulukumba pada khususnya mengenal perdagangan kopra.

Sudah sejak lama masyarakat Bulukumba telah mengenal sistem perdagangan kopra kira-kira pada awal abad ke-20 (sekitar tahun 1906). Laju produksi kopra ini meningkat terus sampai tahun 1912 yang memproduksi hasil kopra sebesar 34.000 ton dan setelah mencapai hasil dalam beberapa tahun, produksi kopra ini menunjukkan prospek yang baik.

Pada tahun 1928 daerah Bulukumba menghasilkan 63.000 ton kopra.<sup>10</sup> Namun ketika itu para pedagang kopra yang disebut "*Pacatto*" atau "*Pappalele*" rata-rata memiliki modal kecil dengan kegiatan usaha yang relatif kecil pula. Sebagian besar "*Pacatto*" atau "*Pappalele*" ini pada dekade yang lampau terkonsentrasi di sekitar Tana Beru di mana mereka membeli dari petani terus menjual ke pedagang besar yakni orang Tionghoa dan Koperasi sebab pada tahun 1950-1957 sistem ekonomi tertuju pada pertanian dan perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dan Koperasi dimana masyarakat umumnya hidup dari pertanian belaka. Masyarakat membawa hasil buminya ke pasar bukan untuk berdagang atau mencari untung tapi hanya untuk mendapatkan pembeli pakaian dan kebutuhan hidup lainnya.

---

<sup>10</sup> Pieter Creutzberg J. T M Van Laenen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1977) hal. 148

Menurut sumber lainnya juga mengatakan tahun 1953-1959 kehidupan ekonomi sangat berpengaruh dimana akibatnya masyarakat hidup dalam serba kemiskinan dan selalu terancam sebab pada masa tersebut masa pendudukan DI/TII yang merugikan kepentingan masyarakat.<sup>11</sup> Memang sudah banyak yang meneliti tentang Bulukumba yang kesemuanya jelas-jelas saling berbeda pokok masalahnya diantaranya:

- Amar Busthanul Jurusan Arkeologi  
Wadah kubu di gua Pasca Ara, Kabupaten Bulukumba, 1991
- Syahrul Amar Jurusan Sejarah  
Kehidupan nelayan pembuat perahu di Tana Lemo Kabupaten Bulukumba tahun 1950-1988, angkatan 1994.
- Asriadi Jurusan Sejarah  
Tinjauan histories tentang keberadaan Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
- DI/TII dan gerakan Dompea di Kajang tahun 1954 Emayanti Djafar 1996.
- Gerakan gerilya serta dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Bulukumba (1952-1957) Amirullah 2002. Sejarah.

---

<sup>11</sup> Wahyuni, *Pembangunan Kabupaten Daerah Tk. II Bulukumba dalam Perspektif Sejarah* (Makassar, Skripsi Sarjana Pada Fakultas Sastra Unhas, 1996). hal. 32.

- Sukmawati Sejarah awal penyiaran Islam di Bulukumba 1994 Jurusan Sejarah.

Disamping itu penelitian tentang masalah ekonomi pada daerah lain mengenai hasil bumi dan perdagangan diantaranya.

- Rahmalia Produksi besar dan dampaknya terhadap ekonomi petani sawah di Pinrang (1965-1988) 2001
- Sejarah perdagangan Makassar 1906-1950 Bachtiar. 1992.
- Rasid Asba dalam kebijakan Ekspor Kopra di Makassar 1952-1968.

Teruntuk yang satu ini dimana setelah penulis amati, maka ditariklah kesimpulan bahwa tesis tersebut menitik beratkan ke sektor perdagangan dan jaringan atau pola pendistribusian kopra dan kelompok besar yang terlihat *serta bisa dijadikan sebagai sumber atau pendukung dalam penyelesaian Skripsi ini*. Oleh karena itu setelah melihat data dan skripsi atau tesis yang ada maka saya dapat mengangkat judul tersebut dalam studi ini sebab belum ada yang menguraikannya secara mendetail

### C. Masalah Dan Batasan Masalah

Masalah yang diuraikan dalam latar belakang dan alasan memilih judul bahwa keadaan perekonomian masyarakat sangat merosot baik petani kelapa maupun pedagang kopra itu sendiri dimana sering terjadi

penduduk yang jatuh miskin dan meninggalkan perkebunannya atau bangkrut yang bisa berdampak pada kesehatan psikologisnya.<sup>12</sup>

Tapi yang jelas menurut Mukhlis Paeni, bahwa pada awal abad ke 20-an dan sesudahnya merupakan masa semakin tergeser dan merosotnya sektor kehidupan agraris khususnya persawahan dan perkebunan kelapa, terutama disebabkan pertumbuhan penduduk dan menyempitnya lahan pertanian karena desakan pemukiman dan bangunan-bangunan.<sup>13</sup>

Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini fokus pengkajian diarahkan pada masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perdagangan kopra di daerah Bulukumba pada kurung waktu tersebut.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya usaha perdagangan kopra di Bulukumba
3. Bagaimana cara pengelolaan kelapa menjadi kopra pada masa itu. Hal tersebut di ataslah yang menjadi sasaran pengkajian dalam penulisan nanti.

Selain masalah-masalah di atas, penulis perlu untuk memberikan batasan spesial masalah yang ada meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Bontotiro dan Tana

---

<sup>12</sup> Paleho, wawancara 12 Februari 2003.

<sup>13</sup> Mukhlis Paeni, *Kehidupan Masyarakat Pantai*

Lemo. Sedangkan batasan temporalnya yakni antara tahun 1952 yang ditandai dengan adanya kemerosotan ekonomi petani kelapa. Sampai tahun 1960 dimana pada saat itu bisa dikatakan peningkatan pendapatan para petani sudah agak stabil dan bidang perdagangan sudah ada tanda-tanda kemapanan serta berakhirnya gerombolan bersenjata di desa-desa Bulukumba.

#### D. Metodologi

Penulisan sejarah adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh setelah melalui pengujian dan analitis dari rekaman serta peninggalan masa lampau.<sup>14</sup> Dengan demikian metode sejarah adalah menimba, mengungkapkan sebanyak-banyaknya dari masa lampau sebagai pelaku dalam peristiwa.

Jadi jelaslah sejarah adalah merupakan gambaran dari peristiwa yang telah terjadi. Gambaran ini tentunya tidak persis sama dengan kejadiannya, namun merupakan hasil imajinatif dari para sejarawan dengan menggunakan sumber-sumber yang diyakini kebenarannya. Sejarawan bukanlah cerita dongeng sebagai pengantar tidur, tetapi sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kejadian ini dapat

---

<sup>14</sup> Louis Gottschalik, *Mengerti Sejarah*, Diterjemahkan oleh Nugroho Notosutanto, (Jakarta : University Indonesia Press, 1983), hsl. 32.

diungkapkan kembali melalui prosedur-prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain mempunyai metode-metode penulisan.<sup>15</sup>

Dalam usaha mengungkapkan dan merekonstruksi masa lampau, diperlukan cara kerja yang mantap, agar dapat meringankan beban dan mengurangi kesulitan yang dihadapi penulis. Cara kerja yang dimaksud adalah metode sejarah yang meliputi pencarian sumber (heuristic), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi).

Dari gambaran di atas, maka sebagai langkah awal adalah heuristic yaitu penelitian berupa pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data mengenai perdagangan kopi maka penulis menggunakan metode pustaka, yaitu pencarian data dengan cara membaca dan mencari dokumen-dokumen, arsip, buku, makalah, serta majalah-majalah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Adapun data yang didapatkan dari penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari arsip-arsip yang terkait langsung dengan peristiwa.

---

<sup>15</sup> Kontowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), hal. 9.

- 
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat dari membaca buku-buku, makalah, majalah yang relevan dan ada kaitannya dengan topik pembicaraan.

Dari semua data yang terkumpul, selanjutnya akan diseleksi dan dianalisa (kritik sumber), dengan tujuan untuk mendapatkan kredibilitas yang dapat dipercaya. Kegiatan ini ada dua macam, yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui materi (arsip, buku majalah), huruf dan naskah, cap atau tanda tangan, kelengkapan dari naskah, serta sumber itu sesuai dengan jamannya. Sedangkan kritik interen dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dari sumber dengan memperhatikan hubungan antara masalah yang terdapat dalam sumber tersebut.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dengan menggunakan metode kritik. Tafsiran dan ulasan akan diwarnai pernyataan yang telah dibuat.

Meskipun telah melalui prosedur-prosedur tertentu namun seorang sejarawan tidak akan pernah dapat merekonstruksi suatu peristiwa masa lampau seperti apa yang benar-benar terjadi. Bahkan menurut Murtadha dalam bukunya "Masyarakat dan Sejarah" mengatakan bahwa seorang sejarawan adalah seorang hakim di pengadilan yang memutuskan atas dasar bukti-bukti sangka dan petunjuk ada padanya, bukan atas dasar

kesaksian saksi semata<sup>16</sup>. Sementara menurut Gottschalk bahwa dalam proses sejarahwan harus memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen. Sesuatu unsur itu bukanlah apa yang sungguh-sungguh terjadi, melainkan unsur itu paling dekat dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Sejarah dapat diketahui suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada<sup>17</sup>.

Setelah semua kegiatan di atas telah rampung maka langkah terakhir adalah merekonstruksi dan menyusun fakta-fakta yang telah didapat menjadi sebuah kisah atau sebuah karya ilmiah.

Semua langkah-langkah yang telah dikemukakan di atas merupakan urutan kerja penulis, sebagai suatu usaha untuk merekonstruksi kembali secara deskriptif analitis dari dampak perdagangan kopra terhadap ekonomi masyarakat di Kabupaten Bulukumba tahun 1952 sampai 1960. langkah-langkah tersebut dilakukan dengan harapan agar tulisan ini menjadi sebuah sajian yang mendekati objektivitas, sehingga menjadi kisah ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

---

<sup>16</sup> Akhmad, *"Perjuangan Rakyat Duri Menentang Kolonialisme Belanda di Duri"* (Skripsi Fakultas Sastra Unhas), hal. 10.

<sup>17</sup> Louis Gottschalk, *Op. Cit*, hal. 32.

## BAB II .

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

#### A. Sejarah Pembentukan Wilayah

Sebelum kedatangan bangsa Barat, yaitu bangsa Belanda di daerah Bulukumba, daerah ini merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh seorang karaeng (raja), yang mempunyai wilayah kekuasaan sendiri (hak otonomi penuh). Kerajaan-kerajaan ini berada di bawah pengawasan kerajaan besar Bone, kemudian beralih di bawah kekuasaan Raja Gowa X yaitu I Manrigau Dg. Bonto Karaeng Lakiung Tumpallangga Ulaweng yang memerintah pada tahun 1546-1565<sup>1</sup>.

Kemudian pada tahun 1600-an bangsa Belanda datang di Sulawesi Selatan dan pada masa penjajahan Belanda sampai ke Bulukumba, Bulukumba dijadikan Onder Afdeling di bawah Afdeling Bantaeng yang juga membawahi Onder Afdeling Sinjai dan Onder Afdeling Selayar. Sejumlah kerajaan di Bulukumba pada masa itu ada lima yang diberikan status Regentschap, yaitu :

1. Kerajaan Bira
2. Kerajaan Kajang
3. Kerajaan Bulukumpa Toa,
4. Kerajaan Gantarang, dan

---

<sup>1</sup> Abd. Razak Dg. Patunru, "Sejarah Gowa", (Yayasan Kebudayaan Sulselra, Makassar, 1967), hal. 227.

## 5. Kerajaan Ujung Loe.

Kerajaan-kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja yang dibantu oleh Sulewatang. Sulewatang membawahi beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang Gelarang. Setelah Indonesia merdeka, daerah Bantaeng dirubah menjadi sebuah Kabupaten. Bulukumba merupakan daerah Kewedanan yang membawahi 14 distrik, yaitu :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Distrik Bulukumba Kota | 8. Distrik Langnge-Langnge                      |
| 2. Distrik Ujung Loe      | 9. Distrik Tana Beru                            |
| 3. Distrik Gantarang      | 10. Distrik Lemo-lemo                           |
| 4. Distrik Kindang        | 11. Distrik Bira,                               |
| 5. Distrik Tanete         | 12. Distrik Ara,                                |
| 6. Distrik Kajang         | 13. Distrik Tiro, dan                           |
| 7. Distrik Hero           | 14. Distrik Batang- Bonto Tangnga. <sup>2</sup> |

Setelah lahirnya undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan tanggal 14 Juli 1959, maka sejak itu kewedanan Bonthain mulai melepaskan diri, seperti Bulukumba, Sinjai dan Selayar. Kewedanan Bulukumba melepaskan diri dari daerah Bonthain sehingga status Bulukumba menjadi Daerah Tingkat II Bulukumba.

Pemberian status otonomi kepada Bulukumba seperti dinyatakan dalam Undang-undang tahun 1959 nomor 29, bukan semata-mata pemberian pemerintah

<sup>2</sup> Lantara S. (Kabag. Pemerintah). *Catatan singkat Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba*. (Bulukumba, Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba, 1960) hal. 24.

pusat tetapi juga merupakan hasil perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Bulukumba baik yang berada di Bulukumba pada waktu itu maupun yang berada di luar daerah.

Ide pertama kali agar Bulukumba mempunyai status otonomi sendiri dimulai pada saat pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI). Kemudian pada tanggal 30 Agustus 1950 ide dari pemuda dan rakyat Bulukumba ini disampaikan kepada pemerintah daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya diharapkan agar segera dipertimbangkan untuk memenuhi keinginan rakyat.<sup>3</sup> Sehingga pada tanggal 5 Maret 1956 Ikatan Kekeluargaan Anak Bulukumba (IKAB), Kerukunan Keluarga Sinjai (KKS) dan Gabungan Tenaga Rakyat (GATRA) mengadakan musyawarah di Makassar yang dihadiri oleh Sekretaris Gubernur Sulawesi, A. Waris serta tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut membahas tentang tuntutan otonomi dari ketiga daerah tersebut<sup>4</sup>.

Perkembangan selanjutnya, sesuai dengan SK. No. 1100 tanggal 16 Agustus 1961 dan nomor 2067 A tahun 1961 tentang "Perubahan Bentuk Distrik Lama" di tingkat II dalam wilayah Pemerintahan baru yang disebut kecamatan di tingkat II dalam daerah tingkat I Sulawesi Selatan. Keempat belas distrik yang ada di Bulukumba di sederhanakan menjadi tujuh kecamatan administratif berdasarkan keputusan daerah tanggal 31 Januari 1963 No. 2/I/DPRD, yaitu masing-masing :

---

<sup>3</sup> Ibid. hal. 24

<sup>4</sup> Ibid. hal. 28

1. Kecamatan Ujung Bulu,
2. Kecamatan Herlang
3. Kecamatan Kajang,
4. Kecamatan Bonto Bahari.
5. Kecamatan Gantaran Kidang
6. Kecamatan Bontotiro
7. Kecamatan Bulukumpa<sup>5</sup>

## B. Keadaan Geografi

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian timur dengan Makassar sebagai ibukotanya, terdiri dari 24 kabupaten dan 2 Kotamadya. Dari segi geografi budaya, wilayah tersebut terbagi atas 4 wilayah besar yaitu (1) Geografi budaya Makassar yang terdiri dari Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Selayar serta Kotamadya Makassar. Sementara budaya terdiri dari dua budaya yakni bugis dan Makassar. (2). Geografi budaya bugis terdiri dari kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Pangkep, Barru dan Kotamadya Pare-pare. (3) Geografi budaya Toraja terdiri dari Kabupaten Toraja, Palopo, Enrekang. (4) Geografi budaya Mandar terdiri dari Mamuju, Majene dan Polewali Mamasa<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, "Sejarah Perkembangan Pemerintah" (Ujung pandang, Departemen dalam negeri) hal. 421

<sup>6</sup> Abdullah, Taufik (ed). *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 1979. hal. 60.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak diantara  $05^{\circ},20 - 05^{\circ},40$  Lintang Selatan, dan  $119^{\circ},58 - 120^{\circ},58$  Bujur Timur, Merupakan kabupaten yang terletak diujung selatan kotamadya Makassar yang jaraknya kurang lebih 155 km, dengan 123 desa / kelurahan termasuk desa/kelurahan persiapan. Jumlah penduduk kabupaten Bulukumba sesuai dengan kantor BPS tahun 1998 berjumlah 347.338 jiwa dengan dengan laju pertumbuhan 0,51%(BPS,1998).<sup>7</sup>Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada pada bagian tenggara yang memiliki potensi lebih dari cukup. Untuk pengembangan berbagai sektor. Luas wilayah kabupaten Bulukumba 1.134 76 KM<sup>2</sup> atau 1,85%. Dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Suku bangsa yang menghuni daerah ini adalah bugis yang berada di bagian barat Kabupaten Bulukumba. Disamping itu Makassar (Konjo) mendiami bagian timur Ibukota Kabupaten Bulukumba. Suku-suku yang lain adalah orang Makassar dari Ujung Pandang, Gowa, Jeneponto, Takalar. Orang-orang luar Sulawesi juga telah banyak di Kabupaten Bulukumba. Sekarang dan sudah berbaur bahkan kawin dengan masyarakat asli<sup>8</sup>.

Kabupaten Bulukumba terletak 155 km dari ibukota provinsi. Dua sisi dari Kabupaten Bulukumba yaitu sisi sebelah selatan dan timur terdiri batas alam berupa laut dan teluk. Untuk jelasnya Kabupaten Bulukumba terletak pada batas wilayah sebagai berikut :

<sup>7</sup> Biro Pusat Statistik, "Bulukumba Dalam Angka", (Bulukumba,Kantor BPS,1998) hal. 12

<sup>8</sup> A. Samad Tahir, *Daerah Wisata di Indonesia*, Sulawesi Selatan ( Ujung Pandang, Dinas Pariwisata 1999) hal. 18

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Laut Flores

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bone

Keadaan Kabupaten Bulukumba cukup menarik dimana pada bagian selatan terdapat dataran rendah, sedang bagian utara dan timur terdapat dataran tinggi dan topografi seperti ini sangat potensial untuk pengembangan produksi tanaman seperti padi, jagung, kopi, cengkeh, jambu mente dan beberapa tanaman ekspor lainnya itu. Pengembangan berbagai jenis fauna yang ditenakkan seperti sapi, kerbau, kambing, kuda dan berbagai jenis unggas.

Kabupaten Bulukumba berjarak 155 km dari Ibukota provinsi dan memegang peranan penting dalam hubungannya dengan Kabupaten Selayar. Selain itu perlu pula diketahui bahwa selain komoditi kopra, Kabupaten Bulukumba juga sangat populer dengan bidang maritim, ada tiga desa yang sering dihubungkan dengan kemaritinan di nusantara yaitu Ara, Bira serta Lana Lemo. Sebagai bukti perahu pinisit yang ditangani oleh orang Bulukumba di masa modern ini masih saja berjaya di laut sebagai perlambang kejayaan masa lalu yang menggambarkan bagaimana nenek moyang kita mengarungi

---

<sup>9</sup> Asmira, *Tradisi Sine Batu Datar Salassae di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba* (Skripsi Fakultas Sastra Unhas, 2000), hal. 20.

nusantara bahkan sampai di luar wilayah nusantara misalnya ke Magege (Australia Utara)<sup>10</sup>.

Sekarang administratif daerah tingkat II Bulukumba terbagi menjadi sembilan (9) wilayah kecamatan termasuk tiga kecamatan perwakilan dengan 123 desa atau kelurahan termasuk desa dan kelurahan persiapan, adapun wilayah kecamatan meliputi :

Kecamatan Gangking	Kecamatan Herlang
Kecamatan Ujung Bulu	Kecamatan Kajang
Kecamatan Bonto Bahari	Kecamatan Bulukumpa
Kecamatan Bontotiro	Kecamatan Kindang
Kecamatan Rilau Ale	Kecamatan Ujung Leo <sup>11</sup>

### C. Keadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya dalam suatu daerah memberikan suatu gambaran khusus akan masyarakat dalam daerah tersebut misalkan daerah Bulukumba ini di mana kehidupan bermasyarakat dan hubungan interaksi sosial masyarakat Bulukumba, cenderung masih dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang terdiri atas anak arung (lapisan masyarakat bangsawan) dan Tomaradeka (lapisan

<sup>10</sup> Asmira, Op. cit. hal. 22

<sup>11</sup> Sesuai dengan UU No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan" buku inventaris Arsip Bulukumba (1930-1960) hal. 4.

masyarakat kebanyakan) yang terdiri atas Tomadeceng dan Tosama (lapisan masyarakat bawah) yang terdiri atas Ata atau pembantu rumah tangga.<sup>12</sup>

Ketiga strata sosial yang berlaku di Bulukumba ini dalam perkembangan dan pelaksanaannya yang berbeda melahirkan karakteristik yang berbeda dan berpengaruh pada tingkah laku bahkan menjadi aturan adat yang tidak boleh dilanggar, olehnya itu hal tersebut di atas tidak boleh kita biarkan berlangsung terus karena bisa mengakibatkan perasaan tersisih pada golongan rendah atau "Ata".

Pada tanggal 7 Agustus 1953 di daerah Bulukumba sekitar 14 distrik telah diduduki oleh pasukan DI/TII yang dipimpin oleh Ali AT, yang salah seorang pemimpin golongan DI TII di daerah Bulukumba

Sementara itu di bidang sosial budaya, Alie AT menghapuskan strata sosial berdasarkan keturunan (kebangsawanan) yang feodalitas. Strategi yang ditempuh adalah dengan memaksa kaum bangsawan untuk melepas gelar kebangsawanannya, dalam rangka menyejajarkan manusia walaupun sebenarnya lahir strata baru. Kegiatan tersebut terlihat ketika pada tanggal 20 Januari 1956 jam 9 pagi, gerombolan menyiarkan selebar pengumuman di kampung Turungeng (Lonrong) yang antara lain melarang memakai nama-nama panggilan, sebutan yang bersifat feodal seperti Andi, Karaeng, Opu, Fetta, Daeng, serta melarang memanggil dengan sebutan ibu dan Bapak apabila

---

<sup>12</sup> Kowaver, *Markas Cabang Bulukumba*, Sejarah Perjuangan Pemuda dan Rakyat Bulukumba dalam revolusi Kemerdekaan Indonesia, hasil perumusan seminar sehari tahun 1994, hal. 9

bukan kepada ibu / bapak kandung sendiri. Istilah sebutan yang diperbolehkan dalam pergaulan adalah saudara atau bung<sup>13</sup>.

Selain itu untuk menarik simpati rakyat terhadap gerakan Alie AT, maka setiap korban perang wajib ditanggung bagian sosial untuk dipertanggung jawabkan kepada penanggung jawab Batalyon ke atas dan diberikan jaminan hidup yang layak. Adapun kebijakan Gerilya tentang kesejahteraan sosial terdapat dalam piagam Makalua yang berisi :

1. Semua janda Sjuhada/mujiba dan anak yatim (korban revolusi) wajib ditampung oleh jawatan sosial setempat.
2. Setiap penanggung jawab revolusi (KPMD dan SWK/Batalyon ke atas) wajib menerima, memelihara dan menanggung beban hidup sekurang-kurangnya 2 (dua) orang janda dan 3 (tiga) orang anak yatim yang diserahkan oleh jawatan sosial setempat atas dirinya.
3. Setiap penanggung jawab dari djanda Sjuhada/Musjiba dan anak yatim diwadjabkan dalam tempo singkat mendjarikan djodoh atas djanda-djanda Sjuhada/Musjiba yang dipertanggung jawabkannya.
4. Djanda Sjuhada / anak yatim yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dipertanggung jawabkan kepada muhrimnya yang bersangkutan untuk memelihara dan menanggung beban hidupnya.
5. Setiap penanggung jawab yang menolak dan atau mengabaikan djanda-djanda Sjuhada/Musjiba dan anak yatim yang dipertanggung jawabkan kepadanya dapat dipetjat dari djabatannya dan dituntut sebagai penghianat.
6. Setiap djanda Sjuhada/ Musjiba dan anak-anak yatim untuk ditanggung /dipertanggung jawabkan dapat di paksa atau dimasukkan ke dalam "camp interneren"<sup>14</sup>

Walaupun pada kenyataannya, kebijakan yang termuat dalam piagam Makalua tersebut di atas, tidak terlaksana pada daerah Bulukumba. Hal ini

<sup>13</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, Arsip Propinsi Sulawesi, 1950-1950, no. Reg. 333.

<sup>14</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995), hal. 180.



terbukti dengan adanya perempuan yang menjadi istri gerombolan yang terpaksa harus lari ke hutan mengikuti suaminya demi menghindari operasi yang dilakukan oleh angkatan perang. Seperti halnya pada seorang perempuan yang bernama Samollija anak dari Lambeng pada kampung Hila-Hila Bontotiro, yang telah dikawini oleh Tamring anggota gerombolan, perempuan tersebut diambil dan ditahan di Bonthain oleh pihak angkatan perang pada tanggal 9 September 1953.<sup>15</sup>

Dalam aspek keagamaan dan ritus masyarakat, Darul Islam melakukan serangkaian perubahan. Misi kepercayaan yang di bawanya adalah bahwa kekuasaan yang mutlak adalah hanya pada Allah saja. Malaikat dan Nabi adalah utusan Allah yang tidak mempunyai kekuasaan, apalagi roh-roh orang yang telah meninggal, serta tempat-tempat dan benda-benda tertentu. Mencegah pemujaan-pemujaan terhadap sesuatu yang dianggap kramat. Ritus-ritus yang dilakukan oleh masyarakat diseleksi dengan ketat, baik jumlah maupun pelaksanaannya. Dari hasil seleksi, maka ada tiga macam ritus yang dianggap bersumber dari ajaran Islam, yaitu ritus siklus hidup (penamaan bayi yang disebut hakikah, penyunatan yang disebut khitanan sebagai lambang peng-Islaman, perkawinan yang disebut walimah dan kematian yang disebut ta'siyah), ritus kesyukuran

<sup>15</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, Arsip Propinsi Sulawesi, 1950-1960, no. Reg. 333.

yang disebut nazar (yang dulunya tinja) dan ritus-ritus hari besar keagamaan atau hari-hari besar Islam (Maulid, Isra' Miraj, Idul Fitri, Idul Adha)<sup>16</sup>.

Hal tersebut di atas dijalankan oleh para gerilyawan dengan ketat, bahkan dalam piagam Makalua dikatakan bahwa :

“Barang siapa melanggar ajaran Islam mengenai pergaulan kerumah tangga dan pergaulan antara laki-laki dan wanita, membuat pertjeraan tanpa alasan hukum dan atau menggantungkan istrinya serta wanita jang memboikot suaminya, maka akan diambil tindakan tegas Revolusioner dan organisasi Revolusi berhak segala barang-barang dan bahkan akan dibunuh”<sup>17</sup>

Oleh karena itu seluruh masyarakat Bulukumba sangat panatik melaksanakan semua isi piagam tersebut yang diwariskan secara turun-temurun yang dilaksanakan sampai sekarang.

#### D. Keadaan Ekonomi Sebelum Tahun 1952

Dalam tahun 1939 dibentuk “Copra contracten ordonantie”, Untuk mengkoordinir proses tata niaga Kopra, Oleh pemerintah hindia yang berpusat di Makassar. Kemudian sekitar tahun 1940-1945 perdagangan kopra mengalami kerisis yang diakibatkan oleh Peran Dunia II dan kehilangan pasaran mengakibatkan petani kelapa kehilangan sumber penghasilan. Selanjutnya tahun 1945-1950 didirikan “Het Copra Fonds” untuk mengatasi kemerosotan harga kopra dan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga mendapat peredikat Single

<sup>16</sup> M. A. Timahi, “*Darul Islam di Maserengpulu* (Studi tentang Perubahan Sosial dan Keagamaan di Malua) dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (editor), Politik Kekuasaan dan Kepemimpinan di Desa (Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Unhas 1981) hal 237.

<sup>17</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan*, Arsip Propinsi Sulawesi, 1950-1960, no. Reg. 333.

Seller dan Single Buyer (monopoli perdagangan ,baik itu berupa pembelian ataupun penjualan kopra dengan Makassar sebagai pusat ekspor kopra Indonesia<sup>18</sup>.

Selanjutnya tahun 1950-1951 sistem perekonomian dalam wilayah Bulukumba tertuju pada pertanian dan perdagangan yang senan tiasa saling berhubungan dimana hasil dari kedua bidang tersebut dikuasai oleh orang-orang tionghoa dan KPN (koperasi).<sup>19</sup> Jadi pada dasarnya Keadaan perekonomian dalam wilayah Bulukumba terfokus pada pertanian dan perdagangan yang senantiasa saling berhubungan. Masyarakat Bulukumba sebahagian hidup dari pertanian dan sebagian lagi berprofesi sebagai pedagang. Sedangkan bidang perdagangan banyak dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dan koperasi.<sup>20</sup> Masyarakat yang membawa hasil buminya ke pasar bukan untuk melakukan perdagangan yang mencari untung, tetapi hanya untuk mendapatkan pembeli pakaian atau kebutuhan hidup lainnya. Hasil-hasil bumi yang di bawa oleh petani pada akhirnya akan jatuh kepada para pedagang perantara. Para pedagang perantara tersebut akan menjual kepada pedagang yang lebih besar, yakni orang-orang Tionghoa ataupun melalui koperasi yang hidupnya tergantung dari untung ruginya perdagangan. Dalam hal ini orang-orang Tionghoa atau koperasi pula yang banyak menjual kebutuhan hidup para petani seperti kain dan alat-alat pertanian. Oleh

<sup>18</sup> Ilham, Perdagangan Kopra di Makassar 1945-1960, (Skripsi sarjana pada fakultas sastra Unhas, Makassar 2000), hal. 49

<sup>19</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan, Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960, Reg. No. 224

<sup>20</sup> Arsip Pribadi M. Saleh Lahade, Reg. No. 228.

karena itu dalam kurung waktu 1950-1951 perdagangan di Bulukumba dikuasai oleh orang Tionghoa dan koperasi<sup>21</sup>

Pada tahun 1950-1951 harga hasil bumi seperti beras dan kelapa (kopra) banyak tergantung dari keadaan pertanian. Apabila hasil panen banyak, maka pada saat panen itu harga kopra lebih murah dari biasanya. Tapi apabila sebagian besar panen dari petani telah dikuasai oleh para pedagang. Maka para pedagang biasanya mengatur harga sesuai dengan harga yang ada di Makassar atau daerah-daerah lain yang menjadi tempat penjualan barangnya serta kebijakan dari DI/TII<sup>22</sup>.

Selanjutnya terkhusus untuk Sulawesi Selatan daerah-daerah penghasil kopra adalah sepanjang pantai Teluk Bone, sepanjang pantai Selat Makassar, di pulau Selayar, serta di pulau-pulau sekitarnya. Kopra tersebut diangkut ke Makassar dari pelabuhan Mamuju, Majene, Polewali, Jampue, Pare-Pare, Sumpang Binangae, Pancana, Labakkang, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kajang, Balang Nipa, Bajoe, Pallima, Belopa, Malili, Pengangkutan di lakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sendiri.<sup>23</sup>

Perdagangan kopra dalam daerah Bulukumba berkembang pesat, disebabkan karena petani perkebunan kelapa sebagai bahan dasar kopra sudah mendapat bimbingan mengenai cara penanaman dengan baik, oleh dinas

<sup>21</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, Arsip Propinsi Sulawesi, 1950-1960, no Reg. 224.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Laside Dg. Tapala, *Zaman Kebangkitan Nasional Sulawesi Selatan, 1900-1942* (Ujung Pandang Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977/1978), hal. 110.

pertanian. Selain itu konsumsi kopra banyak terdapat di daerah ini. Dan di Bulukumba sendiri daerah-daerah penghasil kopra diantaranya Tanah Lembar, Kajang, Bontotiro,

Selain itu Daerah Bulukumba juga termasuk salah satu daerah sufling beras untuk tahun 1951 mengalami kekurangan hingga tahun 1952. Pada tahun 1951 rakyat mampu menghasilkan 60% dari keadaan biasanya, namun tahun 1952 rakyat hanya mampu menghasilkan 40% sehingga pemerintah harus mengirimkan 60 ton beras tiap bulan walaupun dalam hal tersebut masyarakat merasa kekurangan. Harga beras pun meningkat hingga Rp. 21 per liter<sup>24</sup>.

Mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Bulukumba di lapangan untuk bulan Juni – Agustus 1952 diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Pertanian

Hasil Kegiatan dalam lapangan ini adalah :

- Tanaman pada sawah seluas 9362 ha
- Tanaman padi ladang seluas 2136 ha
- Tanaman jagung seluas 5746 ha
- Ubi kaya 1290 ha
- Ubi jalar 388 ha
- Kacang tanah 716 ha

<sup>24</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, "Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960, Reg No. 224.

## 2. Perdagangan

### a. Barang impor berupa

- Beras 21000 kg dari Bone - Perkakas jala 190 kg dari Buton
- Tembakau 1000 kg dari Bone - Laja 1000 bungkus dari Woto
- Garam 2000 kg dari Jenepono - Ikan kering 3000 kg dari Djinato
- Karoro 500 kg dari Buton

### b. Barang ekspor berupa

- Beras 2150 kg ke Makassar - Kentang 14200 kg dari Makassar
- Jagung 5000 kg ke Jenepono - Kopi 2000 kg ke Makassar
- Gaba 350 kg ke Makassar - Kapok 45900 kg ke Makassar
- Kacang tanah 218610 kg ke Makassar
- Kopra 218610 kg ke Makassar
- Karet 5000 kg ke Makassar.<sup>25</sup>

Adapun hasil bumi dari Bulukumba yang diselundupkan tersebut adalah kopra dan kayu, penyelundupan kopra dilakukan melalui pelabuhan Tiro. Dengan perkembangan semakin tahun semakin menurun, yakni 90.100 ton tahun 1956, 47.000 ton tahun 1957, serta 2,85 ton untuk tahun 1958<sup>26</sup>

Penyelundupan-penyelundupan yang terjadi dilakukan karena desakan ekonomi dan tingginya pajak yang berlaku disamping mencari kekayaan pribadi.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, Arsip Provinsi Sulawesi, 1950-1960 No. Reg. 106.

Pedagang yang menjadi perantara dalam menjalankan penyelundupan tersebut adalah Lopo<sup>27</sup>.

Selain itu kepada masyarakat dikenakan pajak retribusi dari penghasilan mereka oleh pendudukan DI/TII yang mereka lakukan pada setiap ... tahun mereka butuhkan dengan alasan untuk membantu perjuangan revolusi Islam yang sedang mereka jalankan<sup>28</sup>.

Adapun bentuk retribusi yang dilaksanakan adalah berupa distribusi perdagangan yakni izin pengangkutan kopra ke Makassar sebesar Rp. 50/ton (100 kg), izin pengangkutan ke daerah lain sebesar Rp. 25 /ton<sup>29</sup>.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa ternyata kehidupan sosial ekonomi pada jarak waktu 1953-1959 bukan semuanya diakibatkan oleh DI/TII secara utuh, namun oleh karena adanya pendudukan DI/TII sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang merugikan kepentingan masyarakat itu. Akibatnya masyarakat hidup dalam serba kemiskinan dan selalu merasa terancam sehingga pada masa itu banyak kampung-kampung yang ditinggalkan oleh penduduknya, hanya untuk mencari perlindungan jiwa dan hartanya<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, Arsip Provinsi Sulawesi, 1950-1960 No. Reg. 330.

<sup>29</sup> *Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan*, Arsip Provinsi Sulawesi, 1950-1960 No. Reg. 106.

<sup>30</sup> Amirullah, *Gerakan Gerilya Serta Dampaknya terhadap Kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat Bulukumba (1952-1957)*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Unhas, 2002, hal. 40.

### BAB III

## PROSES PERDAGANGAN KOPRA DI BULUKUMBA

### A. Sistem Perdagangan Kopra Bulukumba

Dalam menelusuri sistem perdagangan kopra di Bulukumba, maka terlebih dahulu harus dijelaskan struktur perdagangan.

Struktur perdagangan kopra terdiri atas tiga komponen yaitu produsen, pedagang perantara dan pengusaha besar (eksportir). Produsen adalah petani kelapa yang sekaligus membuat kopra pedagang perantara adalah utusan pedagang yang menjadi mata rantai antara pedagang besar atau industri di satu pihak dan pedagang kecil atau penduduk konsumen atau produsen di pihak lain. Sedangkan pedagang besar adalah bagian perdagangan yang berkecimpung dalam usaha ekspor<sup>1</sup>

Ketiga pola dasar itu membentuk masyarakat Bulukumba dimana kita dapat melihat daripada kebutuhan pasar yang khususnya selalu berhubungan dengan hasil laut dan barang dagangan di bawa oleh para nelayan dan pedagang. Komoditi kopra setelah tahun 1952 sistem penyelundupan berkembang secara pesat yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pasukan DI/TII melalui kapal asing yang datang untuk mengambil kopra. Hal itu diperkuat dengan keterlibatan penguasa sebagai

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Asba, *Kebijakan Ekspor Kopra ke Makassar tahun 1927 - 1958*, Tesis. UI, 1995, hal. 81.

pemilik kapal dan pemilik modal.<sup>2</sup> Sebagai bukti tahun 1953 Bulukumba di bawah pimpinan A. Syarifuddin kalah itu pada bulan Oktober Distrik Ujung Leo, Bulukumba Towa, dan distrik Bira mengalami kevakuman dengan tertangkapnya kepala di distrik Bira yang bernama Nape Daeng Matino karena tuduhan melakukan hubungan perdagangan dengan pihak gerombolan serta melakukan penyelundupan kopra, kapuk, kayu, yang dilakukan bersama Andi Mangkona sebagai otak pelaksana.<sup>3</sup> Kemudian pada masa berikutnya sekitar tahun 1955 berkembang menjadi sistem mobilitas pasar yang selalu berhubungan dengan komoditas ekspor seperti ikan kering, kopi, kopra, rotan dan kapok. Dalam sistem mobilitas pasar itu terdapat kelompok pedagang perantara untuk mengatur hubungan antara produsen dan konsumen

Pada umumnya pedagang perantara inilah yang mempertemukan antara produsen dan konsumen. Untuk tata niaga kopra bagi masyarakat petani kelapa telah mengenal berbagai tingkatan mulai dari tengkulak, pedagang perantara (papalele), tukang pengering kelapa sampai pada pedagang-pedagang yang bermodal tinggi. Dalam mobilitas pasar terjadi kontrak kopra kepada petani yang mempunyai areal luas kebun kelapa

<sup>2</sup> Nugroho Nutosusanto, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid III, (PN Balai Pustaka, 1984), hal 134-137

<sup>3</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, *Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960*, No. Reg. 224.

seperti daerah yang terdapat di Selayar dan pesisir pantai Mandar dan Minahasa.<sup>4</sup>

Pedagang perantara memberikan jaminan uang muka atau juga sistem bagi hasil (kongsi) kepada petani kopra dengan jaminan sejumlah pikul kopra atau beras yang diserahkan kepada pemberi pinjaman. Uang muka ini kadang dalam bentuk kontrak kopra atau sewa kebun (sanra Bugis) atau juga dalam bentuk kontrak (teseng Bugis). Pedagang perantara mendapat jaminan dari pedagang besar.

Pedagang perantara terdiri atas orang Cina, Arab dan Bugis yang merupakan kelompok pedagang perantara yang dibentuk oleh para eksportir karena mereka mempunyai peralatan yang diperlukan seperti tempat penjemuran, alat pengangkutan, toko yang menjual kebutuhan sehari-hari kepada petani kopra, di samping mempunyai kemampuan untuk meminjamkan uang kepada petani kopra. Peranan pedagang perantara ini juga bertindak sebagai distributor bahan sandang kepada petani kelapa.<sup>5</sup>

Sedangkan eksportir yang sebagian berkedudukan di Makassar dan luar negeri merupakan penyedia dana bagi para pedagang perantara.

Dalam perdagangan kopra juga sering terjadi kontrak antara petani kelapa dengan para pedagang perantara (Papalele), memuat nama

---

<sup>4</sup> Abdul Rasyid Asba Op. Cit. hal. 81

<sup>5</sup> Ibit hal. 81

petani kecil dan pembeli. Jumlah uang yang diterima oleh petani kecil adalah lebih kecil dari jumlah kopra yang harus diserahkan, biasanya antara 5% sampai 7% yang dibayar kepada pedagang-pedagang kopra di Makassar atau Bonthai. Sistem ini mempunyai dua cara perjanjian. Pertama adalah kontrak jangka panjang antara 5 sampai 15 tahun atau 5 sampai 10 tahun. Sistem ini petani harus membayar kreditornya dengan angsuran empat atau 5 bulan di tambah bunga 6 % sepanjang masa kontrak.<sup>6</sup>

Sementara kreditor menyediakan sejumlah uang yang disetujui pada saat menyediakan kontrak atau penyewaan kebun. Kedua, adalah kontrak tidak bersifat khusus, yaitu pedagang perantara (Papalele) menyediakan jumlah uang yang disepakati pada saat pembuatan kontrak. Disamping itu petani harus melunasinya dengan kopra pada setiap panen sampai uang yang dipinjam beserta bunganya terlunasi. Perhitungan setiap pembayaran didasarkan atas harga pasar lokal kopra yang berlaku di pasaran.

Sifat utama pihak yang terlibat dalam kontrak kopra adalah keduanya terlibat langsung dalam membuat kontrak. Petani dan papalele berusaha mempertemukan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan dagang berada di ujung sistem ini. Dari pihak petani, kontrak terutama

---

<sup>6</sup> ANRI Makassar No 33, *Nootboon Memori Van Overgave Van de Onderafdeling Saleier*, Oktober 1937, hal. 9



ditandatangani oleh kepala keluarga yang disaksikan oleh pemuka agama atau kepala wanua. Mengingat kenyataan bahwa tanah di desa dimiliki oleh sekelompok keluarga, dan sekaligus pengontrolan para Aru/ kampung dalam menerapkan hukum agraria tahun 1893. kesempatan ini juga dimanfaatkan dalam pendataan wajib pajak tanah. Di samping itu untuk mencegah munculnya pemilikan tanah adat perorangan, meskipun banyak raja atau bangsawan lokal masih tetap dominan.<sup>7</sup>

Pedagang perantara kebanyakan adalah orang-orang Cina bekerja sama dengan bumi putra. Orang Cina dan Arab memanfaatkan para pedagang perantara (pappalele) untuk mengumpulkan kopra di pedalaman. Kegiatan ini berlangsung sampai tahun 1958 an dan atau sebelum pemberontakan DI. TII memuncak. Perusahaan dagang Eropa terlibat dalam usaha ini tetapi dalam keadaan jumlah besar dan berhubungan langsung dengan pedagang-pedagang Cina. Tetapi sejak keluarnya UU agraria 1893 dan dipertegas tahun 1937, mereka perlahan-lahan meninggalkan usaha ini meskipun sebagian besar tetap memberi tengkulak modal. Dalam kasus ini ada juga kontrak tertulis di antara pihak-pihak yang terlibat. Para pedagang perantara memiliki gudang dan tempat penimbunan hampir setiap kota-kota pantai, seperti terdapat di

<sup>7</sup> O. M. Goedhart, Perpustakaan Adat Sinjai, Den Haag, 1920. hal 6-9.

daerah Bulukumba (di Tanah Lemo) Selayar dan Mandar<sup>8</sup>. Pedagang perantara juga harus mengambil kopra sampai di Bulukumba khususnya di Tanah Lemo, Kajang yang kemudian diangkut melalui darat atau laut melalui pantai Tanah Beru terus ke Makassar atau berhubungan langsung dengan pedang-pedagang Cina di Sumatera Barat dan Singapura.<sup>9</sup>

Pada tanggal 21 Maret 1956, lahir Yayasan Kelapa Prosu di Makassar, suatu yayasan atau badan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kopra khususnya, serta pembangunan ekonomi nasional guna kesejahteraan masyarakat penghasil kopra umumnya termasuk di Bulukumba ini. Perusahaan ini sempat berjaya sampai 31 Maret 1957, dimana Yayasan Kopra Prosul ini akhirnya dibubarkan karena terlilit banyak utang, ditambah lagi kurangnya kesadaran para anggotanya atau para petani yang mendapat pinjaman dalam sistem kontrak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Perlu diketahui, di Bulukumba terdapat salah satu cabang perusahaan dalam bentuk gudang penyimpanan.<sup>10</sup>

Dalam aktivitas sebagai pengeksport kopra, Yayasan Kopra Prosul mengirim ke negara-negara seperti : Amerika dan Jepang, dengan transportasi yang disediakan oleh perusahaan perkapalan internasional.

<sup>8</sup> Abdul Rasyid Asba, *Op. Cit* 86.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 87.

<sup>10</sup> ANRI. Ujung Pandang. Arsip Pribadi M. Saleh Lahade Reg. No. 272.

Orang Cina dan Arab yang memakai pelayaran tradisional bersaing dengan KPM untuk membawa kopra dari daerah-daerah pedalaman ke Pelabuhan Makassar. Perahu-perahu yang disewa kebanyakan digunakan oleh perusahaan ekspor Cina.<sup>11</sup> Sejumlah kapal-kapal dari luar secara teratur sebagai sarana transportasi seperti kapal Inggris *Abbekers*, *Arendkerk*, *Boschfontein*, Kapal Jepang yaitu *Japanshe Motorvischers Vaartuigen*, *Brandstof voo Rziening* dan kapal Belanda yaitu *Havendients*.<sup>12</sup>

Ketika itu petani menjual kelapanya atau kopranya kepada para pedagang-pedagang partikular, petani memberikan kelapa atau kopra tersebut dan menerima kain dan beras sebagai imbalannya. Jadi transaksi dilakukan secara barter. Dalam sumber tidak pernah disebutkan tentang kuantitas dan beras yang diterima petani, yang diketahui adalah biasanya petani yang pintar tidak mau menjual kopranya apabila tidak dibayar dengan uang. Dari harga kopra ditunjukkan atau dihitung dengan uang yen atau pounsterling. Adapun pedagang-pedagang partikular yang dimaksud tadi adalah pada umumnya orang-orang Cina.<sup>13</sup>

Dalam uraian ini dapat ditarik bahwa prosedur yang terjadi antar petani dengan pedagang adalah pertama bahwa petani membawa sendiri

<sup>11</sup> ANRI Ujung Pandang. Arsip Negara Indonesia Timur, Reg. No. 225.

<sup>12</sup> ANRI Makassar, No. 32 *Memorie van Overgave*, Residen Celebes Onderhoorigheden, hal. 4-5.

<sup>13</sup> Abdul Rasyid Asba. *Ibid* 88.

kelapanya ke daerah pantai atau toko-toko yang mengelola pengeringan kopra. Kemungkinan kedua adalah bahwa diantara pedagang itu yang sudah mengadakan perjalanan ke pedalaman. Mereka menemui petani-petani kepala dengan membayar langsung berdasarkan jumlah pohon kelapa dan kapasitas buahnya. Para pedagang biasanya menawarkan nilai uang atau sistem barter. Berbagai informan mengatakan bahwa petani kelapa memberikan kelapanya kepada pedagang perantara (Pappalele) dan menyerahkan ke gudang-gudang yang mengelola pengeringan kelapa. Pappalele adalah pedagang perantara yang menghubungkan petani penanam kelapa dengan pedagang dan mereka pada umumnya adalah orang-orang Cina dan Bugis Makassar.

Penjelasan di atas tampak bahwa pola ekonomi petani kelapa yang ditonjolkan adalah corak yang subsistensi pekerjaan ekstra di lahan pertanian hanya dilakukan petani untuk memenuhi tuntutan pihak luar. Waktu luang tidak dimanfaatkan untuk mencapai surplus produksi yang diinginkan oleh para pelaku ekonomi. Sampai batas tertentu, pola ekonomi subsistensi dilakukan para petani kelapa. Dengan kata lain perilaku ekonomi secara umum tidak dapat dikemukakan kepada mereka secara menyeluruh karena tidak akan ada produksi kelapa yang diperoleh. Untuk mendapatkan kopra dari petani, para pedagang partikular tidak boleh ada unsur paksaan tetapi atas kehendak petani sendiri.

## **B. Pengolahan Kelapa Menjadi Kopra**

Usaha bertanam kelapa di Bulukumba sendiri sudah sangat lama, pada awalnya hasilnya semata-mata untuk keperluan rumah tangga serta pengembangannya juga sangat sederhana. Sekitar tahun 1600-an proses pembuatan kopra dilakukan oleh petani sendiri mulai dari pengambilan buah kelapa, pengupasan dan pembuangan tempurung, kemudian pengeringan dan selanjutnya penyimpanan untuk dipasarkan. Untuk lebih jelasnya, proses pembuatan kopra sekitar tahun 1600-an sampai 1870-an dilakukan dengan cara yaitu kelapa yang telah dikupas dibelah dua lalu dijemur, dimana hal ini tergantung pada cuaca. Selama pengeringan hendaknya selalu dibolak balik untuk mendapatkan pengeringan yang merata. Untuk menghasilkan kopra yang bermutu maka kelapa yang digunakan yaitu kelapa yang benar-benar tua dan lama pengeringannya biasanya empat sampai lima hari atau sedangkan untuk produksi biasanya dua sampai 3 hari saja apabila cuaca sedang terik.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan kopra yang terus meningkat, keperluan kopra makin lama makin bertambah berkaitan dengan semakin meningkatnya permintaan akan kebutuhan ini, untuk tahun 1917 saja sudah diperkirakan sekitar 108 juta pohon kelapa di Bulukumba, sehingga cara tersebut di atas tidak terlalu mendukung untuk pemenuhan kebutuhan pasar yang disebabkan atas hambatan musim hujan yang

biasanya meningkatkan kadar air yang akan mempengaruhi mutu daripada kopra tersebut, ditambah lagi dengan adanya tuntutan atau standar mutu kopra yang dikeluarkan oleh Yayasan Kopra yakni :

Kualitas A. FMS dengan cacat tak lebih dari 5 %

Kualitas B. FMS dengan cacat tak lebih dari 15 %

Kualitas C. FMS dengan cacat tak lebih dari 30 %<sup>14</sup>

Jadi, untuk menghindari kerusakan mutu pada musim hujan dilakukan alternatif baru dalam proses pembuatan kopra yakni kelapa yang telah dikupas di belah dua lalu diasapi selama kurang lebih 4 jam. Pada proses pengasapan kelapa tersebut hendaknya di bolak balik untuk mendapatkan hasil kopra yang bermutu tinggi biasanya pengasapan dua sampai tiga kali sehari. Sedangkan bisa juga pengasapan berlangsung selama 2 hari saja.<sup>15</sup>

Setelah munculnya alternatif kedua ini, pengiriman kopra keluar tahun 1956 dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat dilihat pada table berikut :

<sup>14</sup> *Arsip Nasional Makassar*, Arsip Pribadi M. Saleh Lahade. Reg. No. 228.

<sup>15</sup> Achamd Djalaluddin. *Pengaruh Mutu Produksi Kopra terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Dati II Polmas*. Skripsi Fakultas Ekonomi Unhas. Makassar. 1999. hal. 38.

Tabel I.

## Pengiriman Kopra Ke Luar Daerah Tahun 1956

Dari Bulukumba	Tujuan					Jumlah (ton)
	Pare-Pare	Makassar	Jawa	Jepang	Singapura	
	589	6.999	1.17	3.499	1.200	12404

Sumber: Daftar Pengiriman dari Yayasan Kopra Tahun 1956.<sup>16</sup>

### C. Faktor-faktor Penyebab Kemerosotan Usaha Kopra

Di Kabupaten Bulukumba dikenal yang namanya pedagang partikular. Pedagang partikular yang dimaksud adalah pada umumnya orang Cina, dimana komoditas kopra mendapat perhatian khusus dari para pedagang entah itu di Makassar dan Bulukumba, Manado dan di beberapa tempat lainnya. Usaha kopra ini mulai berkembang sejak abad ke 19 di daerah Makassar dan kepulauan Selayar sampai pertengahan abad ke 20 sekitar tahun 1960

Secara keseluruhan ekspor kopra mengalami penurunan adalah benar jika dilihat akar permasalahannya menurunnya ekspor kopra Indonesia adalah pertama, pasaran ekspor kopra utama Indonesia adalah Eropa khususnya Belanda. Kedua, Kopra Philipina sudah mulai masuk ke pasaran Eropa dan Amerika sebagai konsumen utama dunia. Ketiga, kurangnya sarana transportasi akibat pelayaran BPM semakin dibatasi

<sup>16</sup> *Arsip Nasional Makassar*, Arsip Propinsi Sulawesi Tahun 1950 - 1960, Reg. No. 383

setelah Coprafonds. (23 September 1940 akibat defresi ekonomi) di nasionalisasi. Keempat, setelah Coprafonds dipindahkan ke Jakarta berbagai wilayah produksi mengeluh akibat politik kopra baik di pusat maupun di daerah.<sup>17</sup> Hal ini sama dengan pendapat Dr. Saroso yang mencoba menarik kesimpulan tentang menurunnya nilai ekspor kopra Indonesia tahun 1945 pada garis besarnya disebabkan.

1. Peraturan Pemerintah penjualan kopra di luar negeri sering berubah sejak akhir tahun 1953.
2. Bentuk organisasi pengumpulan kopra berubah pula yang mempengaruhi persediaan kopra.
3. Dalam tahun 1954 diadakan peraturan mengenai pengangkutan kopra ke Eropa yang ternyata tidak memenuhi harapan semula dan kemudian peraturan lama di pakai lagi.
4. Peranan kopra tahun 1954 mengalami gangguan penyakit.
5. Posisi negeri pembeli kopra di Eropa dalam hubungannya dengan pedagang dollarnya telah bertambah baik sehingga dengan demikian menambah kekuatan kepada kopra Philipina dalam saingannya terhadap kopra Indonesia. Di samping kecenderungan yang telah diuraikan di atas juga disebabkan tidak terpenuhinya usulan dari berbagai daerah produsen untuk disentralisasi dan nasionalisasi

---

<sup>17</sup> Abdul Rasyid Asba, Op. Cit. 93

Yayasan Kopra. Misalnya pada bulan Januari tahun 1955 di Sulawesi Utara, Bulukumba, Seiayar dan Mandar. Berbagai Yayasan Kelapa tidak mau lagi menyetor kopranya untuk pembangunan setempat tetapi melalui pasaran bebas untuk kepentingan pemilik kebun. Sekalipun pemerintah bersedia mendesentralisir Yayasan Kopra dengan jalan memberikan setengah resmi kepada Yayasan sebagai pembeli dan penjual tunggal di wilayah masing-masing bahkan para petani kelapa menuntut supaya dibubarkan Yayasan Kopra.<sup>18</sup>

#### D. Bentuk Pemasaran dan Jaringannya

Di dalam komedi pertanian seringkali dijumpai saluran pemasaran atau rantai pemasaran yang panjang sehingga banyak pelaku pemasaran yang terlibat didalamnya. Akibatnya produsen (petani) sering dirugikan karena di tingkat iniian dilakukan penekanan harga oleh pihak-pihak yang terlibat yakni pihak-pihak yang lebih mampu baik secara ekonomi, pengetahuan maupun pengalaman atau pemasaran.

Sebagai suatu kegiatan penjaluran produk pertanian mula dari titik usaha tani sampai dengan ke konsumen akhir pemasaran mempunyai

---

<sup>18</sup> Ibid hal. 145.

fungsi dan salah satu di antaranya adalah penjualan dan pembelian atau jual beli<sup>19</sup>

Secara umum hasil yang ditunggu dari tanaman kelapa yang dikenai di pasaran adalah penjualan dari buah minyak kelapa dan kopra. Ketiga jenis hasil produksi ini, bentuk penjualan atau pemasarannya sedikit banyak sangat ditentukan jarak serta produksi kelapa itu dengan pusat pertumbuhan ekonomi (kota) ketersediaan sarana dalam serta transportasi. Begitu pula yang tak kalah pentingnya adalah ada tidaknya pedagang perantara desa atau pedagang pengumpul (pemilik mouai) seperti orang Tionghoa disamping ada tidaknya koperasi dan peranannya dalam tataniaga perkelapaan atau perkopraan.<sup>20</sup>

Dalam hubungan itu maka di desa Bulukumpa penjualan hasil panen tanaman kelapa hanya dalam bentuk jenis kopra yang penyaluran atau penjualannya semata-mata kepada seorang pedagang pengumpul (pemilik modal seperti orang-orang Tionghoa) dan koperasi. Melalui pedagang perantara (Pappaleie) yang merangkap sebagai pelepas uang dan pengawas di tingkat desa. Penjualan atau penyaluran yang demikian ini dapat terjadi karena kurangnya pembeli dalam arti kurangnya pedagang

<sup>19</sup> Drillon, dalam Shevoputri, A. 1994. *Analisis Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Tani, Sayur-sayuran di desa Kanreapia, Kecamatan Tinggi Mancong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*, UP. (Tesis, Pascasarjana Unhas), hal. 15.

<sup>20</sup> Yante Liauw, *Dampak Praktik Jual Beli Kopra dari sistem jaminan hasil panen, terhadap petani kelapa di Kecamatan Misoal Kabupaten Dati II Sorong* (Tesis, Pascasarjana Unhas) Makassar 1998, hal. 94.

pemilik modal yang hadir di desa untuk maksud ini (pembeli kopra) menyebabkan terjadinya monopoli atau jaringan pedagang yang bersangkutan.<sup>21</sup> Adanya sistem monopoli ini karena belum adanya lembaga ekonomi pedesaan berupa koperasi yang diharapkan dapat melindungi kepentingan ekonomi para petani kelapa hal ini disebabkan pula oleh tidak adanya alternatif bagi petani kelapa untuk menjual hasil panen dalam bentuk / jenis yang lain. Selain kopra, lantaran hanya kopra saja yang diperlukan oleh pedagang perantara desa untuk pedesaan pengumpul / pemilik modal.

Dengan kondisi yang demikian tidak mengherankan kalau petani kelapa sangat tergantung pada pemilik modal (pedagang). Bahkan lebih dari itu petani kelapa menjadi tidak berdaya ketika kondisi obyektif desa maupun petani kelapanya yang demikian itu dimanfaatkan, dijumpatani melalui pemberian pinjaman uang untuk utang barang. Dengan dijumpatani melalui cara yang demikian petani kelapa bukan saja tergantung hidupnya pada pedagang pemilik modal, melainkan terikat dalam suatu jaringan atau perangkap pemilik modal. Dalam posisi seperti ini bagi petani kelapa (produsen) hanya ada keharusan "balas budi" kepada pedagang karena telah dibantu pada waktu kelapa belum dipanen atau pada waktu kesulitan, baik uang maupun barang, walaupun sifat

---

<sup>21</sup> Ibid hal. 96.

bantuan itu mungkin hanya dikulitnya saja dan isinya bukan. akan tetapi apa daya bagi petani kelapa, jika sudah demikian. Dengan posisi seperti itu, petani kelapa menjadi lebih lemah untuk melakukan tawar menawar harga kopra miliknya sendiri. Bukan tawar menawar dapat dikatakan sama sekali tidak dilakukan melainkan ditetapkan langsung oleh pedagang kopra itu begitu rendah.<sup>22</sup>

Menurut para petani kelapa, pada tahun 1957-1959 Harga kopra perkilogram rata-rata antara Rp. 75 sampai Rp. 150. harga ini bisa lebih baik yaitu antara Rp. 200 sampai 300,- per kilogram bila hadirnya pedagang atau pemilik dari Sulawesi Tenggara (Buton) yang selain membeli dengan uang tunai ditukar pula dengan barang-barang dagangan yang bawanya. Akan tetapi sayangnya kehadiran pedagang dari Sulawesi Tenggara ini tidak sering paling dua kali dalam setahun bahkan juga hanya sekali. Dan ketika penelitian penulis lakukan, disaat para pedagang asal Sulawesi Tenggara (Buton) ini tidak berada di sana, sementara harga kopra yang sedang berlaku saat ini di desa Bulukumpa, Tiro dan lain-lain adalah Rp. 75,- per kg. Rendahnya harga kopra ini ketika di konfirmasi dengan pedagangnya (pembeli) diberikan alasan bahwa karena tingginya biaya transportasi untuk mengeluarkan kopra

---

<sup>22</sup> Yante Liauw Op. Cit. 94.

dari daerah terpencil ke Surabaya dan Makassar.<sup>23</sup> Alasan ini memberi pengertian dan bukti bahwa biaya transportasi kopra secara berencana oleh pedagang dibebankan kepada petani kelapa melalui penekanan harga kopra. Disini kelihatan lagi bahwa petani kelapa tidak memiliki kekuatan untuk menolak mekanisme tataniaga yang ada di sekitarnya, dimana saluran pemasaran mana menggambarkan alur yang panjang. Oleh karena kopra yang telah dibeli atau dikumpulkan oleh pedagang perantara desa / orang kepercayaan oleh orang suruhan pemilik modal yang disebut papalele, akan ditampung oleh pemilik modal di kota untuk kemudian di bawah ke Makassar terus ke Surabaya atau bisa dari Makassar langsung di ekspor ke Eropa, India serta ke Arab tempat dimana para pemilik pabrik langganannya berada.<sup>24</sup> Hal ini menggambarkan pemilik pabrik langganannya berada. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan antara petani sebagai produsen dengan pedagang, pemilik modal dan pedagang perantara desa (orang kepercayaan pemilik modal) serta pemilik modal (pedagang pengumpul) dengan pabrik merupakan suatu hubungan yang panjang.

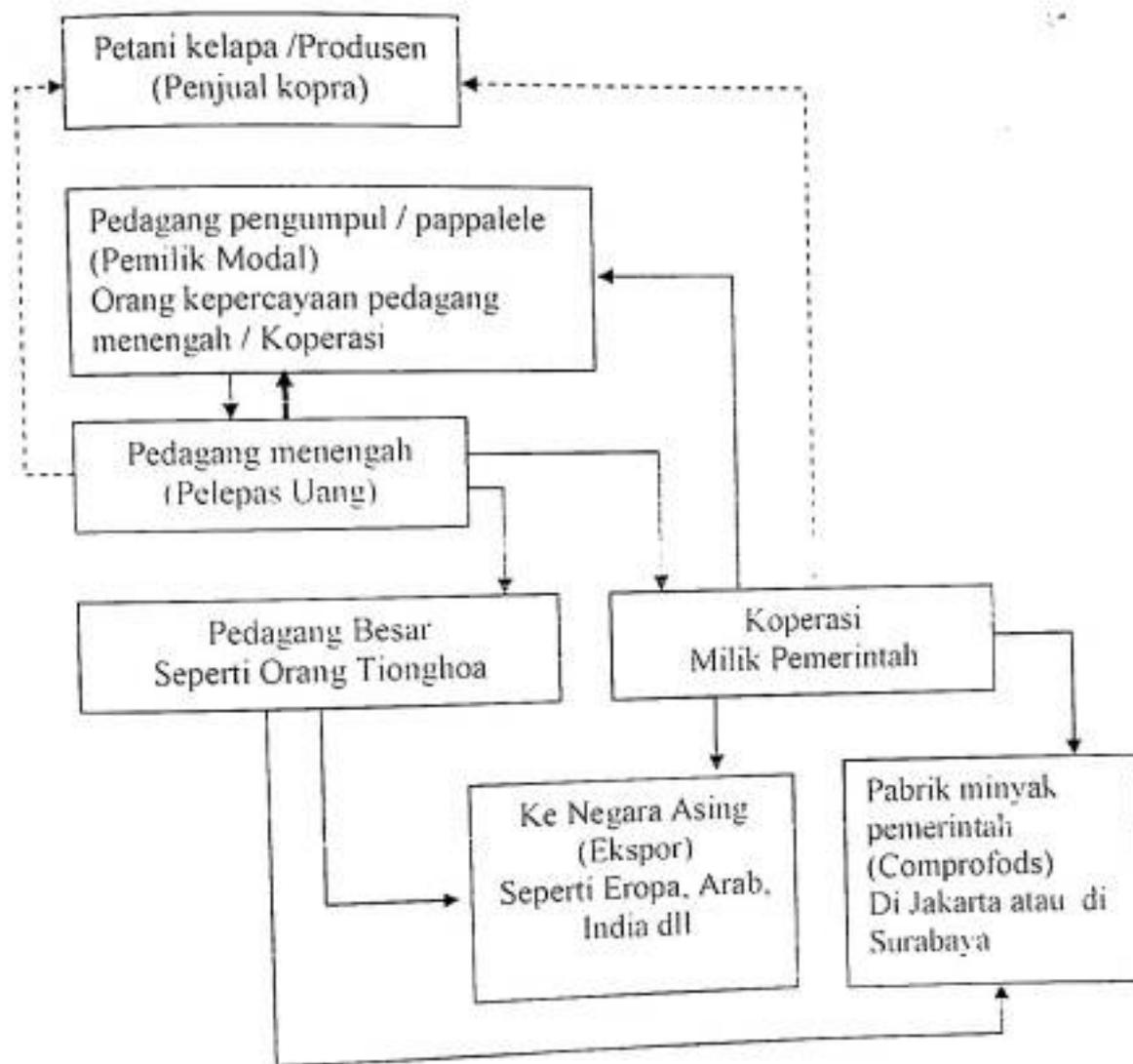
Lebih jelasnya dapat dilihat pada saluran pemasaran kopra Bulukumba yang begitu panjang.

---

<sup>23</sup> Paleho, Wawancara, 12 februari 2000

<sup>24</sup> Achmad Djalluddin, *Op. cit.* 38

### Pola Saluran Sistem Pemasaran Kopra di Sulawesi Selatan



Keterangan :

- > Hubungan Penyerahan Barang
- > Hubungan Modal
- - - - -> Hubungan pemberian pinjaman / panjar/utang barang



Saluran pemasaran di atas kelihatannya sederhana tetapi dari kesederhanaan ini memperlihatkan beberapa hal. Dari aspek ekonomis, dapat dilihat bagaimana saluran pemasaran itu berformulasikan fenomena ekonomis yang menciptakan ketergantungan bagi petani kelapa sebagai produsen. Kemudian dari aspek politis yang berkaitan dengan kecilnya akses bagi petani kelapa dalam kesempatan untuk turut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut haknya. Dari aspek sosiologis menampakkan terbatasnya interaksi sosial dari petani kelapa. Interaksi sosial yang dimaksud adalah proses saling pengaruh mempengaruhi untuk merumuskan pikiran, perasaan dan harapan, masing-masing berlandaskan faktor-faktor kesukaran akan interdependensi, demikian dari aspek hukum memperlihatkan suatu hubungan kebebasan berkaitan dalam kemampuan ekonomi, pengetahuan dan pengalaman) yang berakibat ketidakadilan dan kecurangan yang menciptakan kerugian bagi petani kelapa.<sup>25</sup>

Pada tahun 1959-1960 sistem kerja perdagangan kopra di Bulukumba dikoordinir oleh system kerja koperasi kopra dimana system kerjanya berjalan dengan lancar ketika koperasi kopra didaerah bertugas untuk melindungi kepentingan petani kelapa sebagai penghasil kopra

<sup>25</sup> Hadikusuma, dalam Harahap, Y. 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, hal. 78.

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60/ 1950 . Diakhir tahun 1960-an perdagangan kopra di Bulukumba masih tetap berlangsung, namun penguasaan kopra sudah dikuasai tiap-tiap Daerah Tingkat II penghasil kopra sendiri yang berlanjut hingga sekarang<sup>26</sup>

Perkembangan selanjutnya setelah keadaan mulai pulih maka pelaksanaan administrasi pemerintahan mulai ditata dengan baik. Rakyat bulukumba mengusahakan adanya status kewedanan Bulukumba menjadi daerah Kabupaten dengan Bupati adalah Andi Patatai yang dilantik pada tanggal 12 Februari 1960.

---

<sup>26</sup> Arsip Nasional Makassar , *Arsip pribadi H.A.R. Tanma M. Dg. Patobo Reg.No.503*

## BAB IV

### DAMPAK PERDAGANGAN TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT

Kopra merupakan hasil dari pengolahan buah kelapa oleh masyarakat petani kelapa yang cukup dikenal dalam masyarakat Indonesia, kopra yang berasal dari tanaman kelapa dikenal di seluruh Indonesia baik sebagai tanaman konsumsi maupun sebagai tanaman industri. Dalam kehidupan sehari-hari, kelapa memegang peranan yang sangat penting karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan oleh petani atau masyarakat pada umumnya.

Usaha bertanam kelapa di Indonesia sendiri sudah sangat lama, pada awalnya hasilnya semata-mata untuk keperluan rumah tangga serta pengembangannya juga begitu sangat sederhana. Proses pembuatan kopra dilakukan oleh para petani sendiri, mulai dari pengambilan buah kelapa, pengupasan, dan pembuangan tempurung, kemudian pengeringan dan selanjutnya penyimpanan untuk dipasarkan.<sup>1</sup> Baru sekitar tahun 1870, kelapa kemudian begitu penting dan mulai diperhatikan oleh para petani, karena hasil kelapa sebagai kopra sudah mulai diperdagangkan.

---

<sup>1</sup> Puang Selo, wawancara, tanggal : 12 Februari 2000.

Keperluan kopra makin lama makin bertambah, berkaitan dengan semakin meningkatnya permintaan akan kebutuhan ini, sehingga hubungan dengan itu peranan kelapa juga makin berkembang dengan pesat dan luas, untuk tahun 1917 saja sudah diperkirakan sekitar 108 juta pohon kelapa di Indonesia.

Pertanaman kelapa semakin berkembang dan mulai mendapat perhatian serius yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan verifikasi usaha pada tahun 1920-an, pemerintah Hindia Belanda melihat daerah-daerah di Indonesia bagian timur, tampaknya tak ada tanaman-tanaman ekspor yang lain selain kelapa yang lebih menarik perhatian dan juga mendapat pasaran yang bagus dalam perdagangan dunia saat itu khususnya pada daerah kawasan pantai Sulawesi.

Kopra pada awalnya dikembangkan oleh para petani-petani kecil, di daerah-daerah pesisir pantai, para petani-petani tersebut tidak mengembangkan tanaman dengan baik, dan pemeliharaannya juga tidak diperhatikan, namun karena lama kelamaan komoditas ini semakin dibutuhkan dan semakin memberi peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga memberikan motivasi kepada para petani untuk lebih meningkatkan produksinya, baik dengan perluasan areal tanaman kelapa ataupun pemeliharaan tanaman-tanaman kelapa. Mengenai sejarah masuknya, kapan dan bagaimana kelapa mulai ada dan dimulai ditanam tak diketahui dengan

pasti, sebab umumnya menyebutkan bahwa oleh para pedagang dan pelaut yang sampai ke Philipina, sekembalinya dari sana mereka membawa bibit pohon kelapa dan kemudian mengembangkannya. Mulanya para petani tertarik untuk mengembangkannya karena tanaman ini dapat dipergunakan sebagai tanaman barter dengan produk lainnya seperti kain, beras, jagung ataupun produk yang lainnya.

Daerah-daerah di Sulawesi yang banyak menghasilkan kopra antara lain Minahasa, Bolaang Mangondow, Sangir (termasuk Tuguan dan Una-una), Pantai Barat Sulawesi, Donggala Utara, Banggai, Pantai Mamuju-Mandar, Selayar, Sinjai, Bulukumba, Halmahera, Bacau Seram, Ambon, Bulu, Kepulauan Sunda kecil, Kelompok Tanibar, Kei, Aru, Papua (pantai utara selatan).<sup>2</sup>

Seiring dengan pasaran kopra yang semakin mengglobal dan semakin dibutuhkan, ini terlihat dengan begitu banyaknya permintaan-permintaan akan komoditi ini baik dari daerah lain ataupun permintaan untuk keperluan ekspor ke luar negeri, maka petani juga dituntut untuk memperbaiki mutu produksi kopranya sehingga diharapkan kualitas kopra Indonesia yang dahulunya tak punya nama dapat bersaing dengan kopra negara lain.

Perdagangan kopra sendiri pada awalnya dilakukan secara partikulir, oleh para pedagang untuk mendapatkan kelapa dari para petani, mereka

---

<sup>2</sup> Abdul Rasyid Asba, *Op. cit.*, hal. 24

memberikan kain ataupun beras sebagai imbalannya atau dengan kata lain dilakukan dengan barter, pedagang-pedagang partikular tadi umumnya dilakukan oleh orang-orang Tionghoa (Cina). Pada proses perdagangan ini petani kelapa dan penghasil kopra dipandang dari sudut ekonomi tak berdaya dalam menghadapi pedagang-pedagang ini. Sejarah daerah-daerah kopra memperlihatkan bukti bahwa manfaat pertanaman kelapa sebagian besar jatuh pada pedagang-pedagang tersebut dan hanya sebagian kecil bisa dinikmati para petani.

#### A. Dampak Positif

Kehadiran para pedagang Tionghoa dan koperasi sebagai pemicu terjadinya peningkatan pendapatan petani kelapa dan masyarakat setempat sebagai akibat bahwa sebelum para tengkulap tersebut di atas kelapa semua diambil untuk keperluan rumah tangga serta pengembangannya juga begitu sangat sederhana. Tetapi setelah para pedagang ini datang, masyarakat mulai merawat batang kelapa mereka dan berlomba-lomba untuk mempunyai lahan yang luas.<sup>3</sup>

Kopra merupakan produk pertanian yang cukup dikenal dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari kelapa memegang

---

<sup>3</sup> Ilham, *Pedagang Kopra di Makassar tahun 1950 – 1960*, (Makassar, skripsi Sarjana Unhas Fakultas Sastra), hal. 52.

peranan penting karena hampir semua bahagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan oleh petani atau masyarakat pada umumnya.

Dalam hal peranan petani dalam perdagangan sebagai suatu proses ekonomi, dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin agar mampu menyediakan hasil produksi dengan mutu yang sesuai keinginan para pelaku ekonomi, dan peningkatan di bidang pertanian. Namun peranan pengusaha sangat menentukan kebijakan yang akan dijadikan pedoman perdagangan. Karena itu antara petani, pedagang dan penguasa terdapat hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dan hubungan ini adalah hubungan yang saling menguntungkan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kopra sebagai sumber penghasilan masyarakat, pada masa pendudukan DI/TII ini tidak dapat diolah dan dikerjakan secara maksimal oleh masyarakat itu sendiri. Mereka hanya diperbolehkan untuk mengolah potensi yang ada dengan persyaratan harus menunjang gerakan dan kebutuhan DI/TII sumber penghasilan masyarakat harus dibagi dengan DI/TII sementara mereka tidak dapat bekerja secara layak oleh karena tekanan-tekanan serta berbagai ancaman yang dilakukan oleh DI/TII, terutama para pendukungnya yang sebagian besar hanya bekerja untuk kepentingan sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ilham, *Pedagang Kopra di Makassar, tahun 1945-1960*, Skripsi Sarjana Unhas, Fakultas Sastra, hal. 2.

<sup>5</sup> Syahrul Amar, *Kehidupan masyarakat Pembuat Perahu di Tana Lemo Kabupaten Bulukumba, tahun 1950-1988*, Skripsi Unhas, Fakultas Sastra, hal. 34.

## B. Dampak Negatif

Sulawesi Selatan dalam tahun 1950 berada dalam kondisi yang tidak aman pemberontakan Andi Azis merupakan suatu proses munculnya konflik antara rakyat Indonesia dengan tentara bekas KNIL. Kondisi ini dipertanyakan bagi munculnya pemimpin tentara sebagai tokoh-tokoh penyelundupan, dimanfaatkan untuk mencari kekayaan pribadi dan memanfaatkan sistem barter.

Permasalahan tersebut di atas menyebar dan sangat terasa di Kabupaten Bulukumba, dimana para penduduk petani kelapa ataupun pedagang kopra merasa was-was apabila nanti dia dirampok atau dimintai pajak untuk segala macam.

Oleh karena itu, setelah membaca beberapa sumber bahwa yang menyebabkan para pedagang dan masyarakat bisa mengalami kerugian :

- Akuntan yang buruk menimbulkan perbedaan harga lokal, ini berarti kerugian besar para pedagang dan sasaran para pedagang untuk menutupi kerugian mereka adalah para petani.
- Tingginya pajak yang dikenakan
- Seringnya terjadi perampokan.<sup>6</sup>

Kemudian pada bab terdahulu diuraikan apabila dicapai jalur pemasaran kopra dan rantai pemasaran yang sangat panjang pihak

<sup>6</sup> Anhar Gonggong, Op. Cit. hal. 408.

pertama yang dirugikan adalah masyarakat atau petani kelapa (produsen) disebabkan banyaknya pihak yang terlibat.

Sejak awal perdagangan kopra masyarakat bukannya tidak menyadari dampak negatif sistem kontrak itu, khususnya dalam perdagangan kopra ini, maka dari itu sejumlah toko/pedagang kecil-kecilan mengambil inisiatif untuk membentuk bank kredit Selayar merupakan cabang dari Bonthain untuk membantu petani kelapa.

### C. Perkembangan Terakut Ekonomi Bulukumba

Setelah masa gerilya atau gerombolan berlalu terjadi beberapa perubahan khususnya di sektor ekonomi.

Rakyat yang melakukan pengungsian ketika terjadinya perselisihan dengan pihak gerombolan sudah mulai kembali ke kampungnya masing-masing untuk mengerjakan lahan pertaniannya yang selama ini tidak pernah digarap lagi akibat rasa cemas dan takut dari pihak gerombolan. Rakyat sudah bebas berjalan dari daerah satu ke daerah lain.

Dengan kondisi tersebut di atas, tentunya akan mempengaruhi sektor perekonomian. rakyat tidak mengkhawatirkan lagi akan adanya aksi-aksi dari pihak gerombolan. Rakyat yang sebelumnya mempunyai profesi berdagang telah mampu melanjutkan profesinya. Bahkan banyak dari mereka yang melakukan perdagangan keluar daerah, misalnya

Selayar, Sinjai, Makassar, dan lain-lain. Akibatnya rakyat mampu meningkatkan hasil pendapatannya. Keadaan tersebut berlangsung setelah dikeluarkannya surat keputusan tentang terbentuknya Bulukumba menjadi daerah Kabupaten.<sup>7</sup>

Sejak saat itu, Bulukumba di bawah pimpinan daerahnya mulai membangun daerah Bulukumba dengan penuh semangat dan bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal segenap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan asas pelestarian sumber daya alam. Atas dasar itu Kabupaten Tingkat II Bulukumba dari tahun ke tahun dapat menampilkan wajah yang cerah, berubah dalam proses perkembangannya menuju kepada kemajuan yang dicita-citakan oleh rakyat bersama pemerintahannya.

Sejak berdirinya Bulukumba dengan status Daerah Tingkat II yang berotonom dan memiliki kemampuan yang berswasembada pangan. Bulukumba merupakan daerah yang potensial bidang perekonomian

---

<sup>7</sup> Wahyuni, 1996., *Pembangunan Kabupaten Daerah Tk. II Bulukumba dalam Perspektif Sejarah*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Unhas, hal. 32.

yang didukung dengan lahan pertanian yang cukup luas. Sehingga sangat wajar apabila Bulukumba lebih memfokuskan pembangunannya pada sektor pertanian. Pemerintah juga mengusahakan adanya kesinambungan antara eksploitasi dengan distribusi dana. Dengan demikian dalam fase-fase perjalanan sejarahnya, daerah Bulukumba dapat memenuhi anggaran belanjanya yang bersumber dari hasil pendapatan daerah.<sup>8</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan tentang keadaan perekonomian Kabupaten Pasca Gerakan Gerilya, yakni periode 1963-1966.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bulukumba

Pada tahun 1963 nilai PDRB daerah ini tercatat sebesar Rp. 79.688 juta. Kemudian menjadi Rp. 88.461 juta (1964). Selanjutnya pada tahun 1965 naik lagi menjadi Rp. 101.660 juta dan pada tahun 1966 mencatat angka sebesar Rp. 101.946 juta. Angka-angka ini diperoleh dari perhitungan berdasarkan harga berlaku.

Tayangan pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Bulukumba selama periode 1963-1967 mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 3,98 persen pertahun. Pada tahun 1964 laju tumbuh daerah Bulukumba mencatat angka sebesar 3,54% dan pada tahun-tahun selanjutnya nampak terjadi peningkatan yaitu sebesar 3,86%

<sup>8</sup> Ibid hal. 22

(1965) dan 454% di tahun 1966. Angka pertumbuhan ini dihitung berdasarkan harga konstan 1963, sehingga kenaikan disini adalah merupakan kenaikan riil yaitu tidak lagi dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 1962-1966 (Juta rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN RIIL (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1963	79.668,10	79.668,10	-
1964	88.461,27	82.487,86	3,54
1965	101.659,69	85.671,64	3,86
1966	110.945,64	89.558,08	4,54
RATA-RATA 1963-1966	XX	XX	3,98

Catatan : \*) Angka Sementara

Sumber Arsip : Statistik Ekonomi Kab. Bulukumba 1963-1966 (Ulasan Singkat Keadaan Perekonomian Kab. Bulukumba 1963-1966) Pada Kantor Bappeda Bulukumba, hal. 15.

b. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha yang dihitung sektor yang mencapai pertumbuhan tertinggi adalah sektor Listrik, Gas dan Air dengan laju tumbuh sebesar 9,65% rata-rata per tahun. Pertumbuhan sektor listrik, Gas dan Air pada tahun 1964 mencapai kenaikan besar 10,96%, tahun 1965 mencapai 10,05% dan tahun 1966 laju tumbuh sektor ini menurun menjadi sekitar 8,00. pada urutan ke 2 adalah sektor industri pengolahan dengan mencapai angka

pertumbuhan sebesar 9,01% rata-rata pertahun, dimana pada tahun 1964 mencatat angka 9,61%, tahun 1965 sebesar 10,56% dan sebesar 6,90% di tahun 1971.

Pada urutan berikutnya ditempati oleh sektor bangunan mencapai laju tumbuh sebesar 7,31 per tahunnya, yaitu sebesar 5,34% (1964), pada tahun 1965 sebesar 9,58 % dan sebesar 7,05% untuk tahun 1966. sektor yang menempati urutan ke empat adalah sektor Pemerintahan dan Jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,52% per tahun, yaitu dengan laju tumbuh sebesar 3,93% (1964), sebesar 5,79% (1965) dan sebesar 6,86% di tahun 1966 selanjutnya berturut-turut pada urutan ke lima, keenam, dan ketujuh ditempati oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan laju tumbuh sebesar 5,32 per tahun, sektor pertambahan dan galian (5,01%) per tahun dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 4,80% setiap tahunnya. Adapun dua sektor lainnya masing-masing sektor bank dan lembaga keuangan serta sektor pertanian hanya mencapai sekitar 3,43% dan 2,54% per tahun. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha Tahun 1963-1966 (%)

Lapangan Usaha	1963-64	1964-65	1965-66	Rata-rata 1963-1966
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pertanian	4,97	0,75	1,93	2,54
- Pertambangan /galian	7,97	2,30	4,48	5,01
- Industri pengolahan	9,61	10,56	6,90	9,1
- Listrik, Gas dan Air	10,93	10,05	8,00	9,65
- Bangunan/Kontruksi	5,34	9,58	7,05	7,31
- Perdagangan, Hotel dan Restoran.	5,49	5,39	5,04	5,32
- Angkutan dan Komunikasi	3,38	4,96	6,077	4,80
- Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	3,78	4,22	2,30	3,43
- Pemerintahan dan jasa lainnya	3,93	5,79	6,86	5,52
	3,54	3,86	4,54	3,98

Catatan : \*) Angka Sementara

Sumber Arsip : Statistik Ekonomi Kab. Bulukumba 1963-1966 (Ulasan Singkat Keadaan Perekonomian Kab. Bulukumba 1963-1966) Pada Kantor Bappeda Bulukumba, hal. 17.

### c. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi PDRB menurut lapangan usahanya. Dari komposisi ini dapat diketahui bagaimana peranan masing-masing

sektor dalam pembentukan total PDRB daerah yang bersangkutan selama kurun waktu tertentu. Semakin besar suatu sektor terhadap total PDRB, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Adapun komposisi PDRB Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Beraku Tahun 1963-1966 (%)

Lapangan Usaha	1963	1966*	Perubahan 1963-1966
(1)	(2)	(4)	(5)
- Pertanian	59,74	59,74	0,96
- Pertambangan /galian	0,13	0,13	0,00
- Industri pengolahan	0,67	0,67	0,09
- Listrik, Gas dan Air	0,17	0,17	0,02
- Bangunan/Kontruksi	3,13	3,13	0,22
- Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,32	13,32	0,03
- Angkutan dan Komunikasi	4,47	4,47	-0,02
- Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	6,83	6,83	-0,22
- Pemerintahan dan jasa lainnya	11,54	11,54	0,74
	100,00	100,00	X

Catatan : \*) Angka Sementara

Sumber Arsip : Statistik Ekonomi Kab. Bulukumba 1963-1966 (Ulasan Singkat Keadaan Perekonomian Kab. Bulukumba 1963-1966) Pada Kantor Bappeda Bulukumba, hal. 19.

#### d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 1963-1966 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hasil perhitungan atas dasar harga berlaku diperoleh angka sebagai berikut : Pada tahun 1963 angka perkapita daerah Bulukumba mencatat angka sebesar Rp. 228.919 kemudian meningkat menjadi Rp. 250.467 pada tahun 1964, selanjutnya pada tahun 1965 dan tahun 1966 telah mencapai angka sebesar Rp. 284.456 dan Rp. 306.178.

Pertumbuhan riil pendapatan perkapita Kabupaten Bulukumba yang diperoleh dari hasil perhitungan berdasarkan harga konstan 1963 mencatat angka rata-rata sebesar 2,59% pertahun selama periode 1963-1966. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1966 dengan mencatat angka sebesar 3,10%. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan perkapita daerah Bulukumba masih sekitar 2,02 % tahun 1964 dan sebesar 2,64% di tahun 1965, dengan demikian angka perkapitanya menunjukkan peningkatan selama tahun terakhir.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Pendapatan Perkapita Kabupaten Bulukumba  
Tahun 1963-1966

TAHUN	PENDAPATAN PERKAPITA (Rp)		PERTUMBUHAN RILL (5)
	Harga Berlaku (2)	Harga Konstan 63 (3)	
(1)			(4)
1963	228.919	228.919	-
1964	250.467	233.554	2,02
1965	284.456	239.270	2,64
1966	306.178	247.154	3,10
Rata-rata 1969-1972	XX	XX	2,59

Catatan : \*) Angka Sementara

Sumber Arsip : Statistik Ekonomi Kab. Bulukumba 1963-1966 (Ulasan Singkat Keadaan Perekonomian Kab. Bulukumba 1963-1966) Pada Kantor Bappeda Bulukumba, hal. 21.

e. Inflasi

Menurunnya nilai uang atau sering disebut suatu kenaikan harga dapat diartikan sebagai inflasi. Pada umumnya inflasi digambarkan oleh Indeks Harga Konsumer (IHK), akan tetapi dari hasil perhitungan angka inflasi Kabupaten Bulukumba teriinat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Inflasi menurut Indeks Implisit Kabupaten Bulukumba Tahun 1963-1966 (%)

Lapangan Usaha	1963-64	1964-65	1965-66*	Rata-rata 1963-1966
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pertanian	8,30	11,82	3,23	7,78
- Pertambangan /galian	8,51	4,43	5,81	6,25
- Industri pengolahan	9,65	5,31	5,81	6,92
- Listrik, Gas dan Air	6,89	5,79	5,67	6,12
- Bangunan/Kontruksi	6,10	8,09	5,16	6,45
- Perdagangan, Hotel dan Restoran.	5,28	11,39	5,00	7,22
- Angkutan dan Komunikasi	6,69	6,41	5,99	6,36
- Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	6,36	7,07	7,02	6,82
- Pemerintahan dan jasa lainnya	5,04	8,96	7,43	7,14
	7,24	10,65	4,40	7,43

Catatan : \*) Angka Sementara

Sumber Arsip : Statistik Ekonomi Kab. Bulukumba 1963-1966 (Ulasan Singkat Keadaan Perekonomian Kab. Bulukumba 1963-1966) Pada Kantor Bappeda Bulukumba, hal. 22.

Pada tabel 2.5 di atas digambarkan besarnya inflasi se tiap sektor di Kabupaten Bulukumba. Sektor Pertanian menunjukkan inflasi tertinggi selama periode 1963-1966 dengan mencatat angka



rata-rata sebesar 7,78 persen setiap tahunnya. Inflasi tertinggi sektor ini terjadi tahun 1965 yaitu sebesar 11,82 persen dan yang terendah sebesar 3,23 persen tahun 1966. Selanjutnya pada urutan kedua dengan inflasi rata-rata 7,22 persen pertahun terjadi pada sektor perdagangan, Restoran dan Hotel, yang juga mencatat inflasi tertinggi pada tahun 1965 sebesar 11,39 persen dan terendah pada tahun 1964 sebesar 5,28 persen. Kemudian urutan ketiga dan keempat dicapai oleh sektor Pemerintahan dan Jasa-jasa dan sektor industri dengan rata-rata inflasi masing-masing sebesar 7,14 persen dan 6,92 persen setiap tahun selama periode 1963-1966. Adapun sektor-sektor lainnya, rata-rata inflasi pertahunnya merata yaitu dengan inflasi sekitar 6 persen. Inflasi terendah di tempati oleh sektor listrik, Gas dan Air Minum dengan angka sebesar 6,12 persen pertahun selama periode yang sama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara historis pada umumnya pedagang kopra di Bulukumba mengalami tingkat proses perdagangan atau pengolahannya juga berkembang, mulai dengan tata niaga yang berbentuk tradisional yaitu proses perdagangan yang didominasi oleh para tengkulak ataupun pedagang-pedagang partikular tanpa suatu koordinasi khusus yang menguasai permasalahan kopra.

Selanjutnya diterapkan sistem yayasan kopra, suatu sistem tata niaga yang merupakan suatu pembelian dan penjualan yang hanya dikoodinasi oleh suatu badan khusus. Periode ini keuntungan yang besar hanya dinikmati oleh yayasan kopra itu sendiri namun hidup kekurangan bagi petani kelapa, kemudian diterapkan pola perdagangan sistem pusat yang pada dasarnya masih merupakan kelanjutan sistem yayasan kopra, bentuk perdagangan aktif melakukan pembelian sampai ke daerah-daerah dan terakhir di bentuk koperasi kopra yang merupakan suatu kesatuan organisasi yang memberikan hak kepada koperasi-koperasi terhadap anggotanya melakukan pembelian secara bebas dan petani sendiri masuk ke dalam koperasi-koperasi tersebut.

Namun terlihat perkembangan proses tata niaga kopra di Bulukumba yang agak bagus, tapi tidak bagus dengan perbaikan nasib para petani kelapa. Walaupun kopra menjadi komoditi yang sangat laku dalam pemasaran dunia, namun taraf kesejahteraan petani kelapa tidak terikat, ini karena pola perdagangan yang hanya selalu menguntungkan pihak-pihak pedagang atau pengelola badan yang mengurus pengkopraan, tanpa ada perhatian serius akan kepentingan-kepentingan petani kelapa.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya kepada para petani kelapa penghasil kopra itu sendiri yaitu :

- a. Melihat pentingnya peranan yang dimiliki pada sektor perkebunan dalam pembangunan khususnya pembangunan perkebunan kelapa, maka disarankan agar selalu diadakan penelitian mengenai perkebunan melalui Balai Latihan Perkebunan, agar meningkatkan penyuluhan dan bimbingan terhadap perkembangan kopra sebagai dasar pembinaan selanjutnya.

- b. Untuk merangsang petani kopra dalam meningkatkan produksi dan memperluas areal tanamannya atau dalam rangka mendukung pemerintah di bidang ekspor non migas, maka peranan pemerintah sangat diharapkan untuk menjaga kestabilan harga kopra.
- c. Dalam pengolahan kopra dengan sistem pengasapan diperlukan pengawasan yang baik.
- d. Sebagai saran penulis ditujukan kepada generasi penerus khususnya yang berkecimpung dalam dunia kesejarahan, untuk mengkaji lebih lanjut tentang sejarah perekonomian Bulukumba, guna untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kehidupan masa lampau di daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik (ed), 1979. *Sejarah Lokal Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Rasyid, 1995. *Kebijakan Ekspor Kopra ke Makassar tahun 1927-1958*, Tesis, UI, Jakarta.
- Abdul Razak Dg. Patunru, 1961, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar.
- Achmad Djalaluddin, 1999. *Pengaruh Mutu Produksi Kopra Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Polmas*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Unhas, Makassar.
- Akhmad, 1997. *Perjuangan Rakyat Duri Menentang Kolonialisme Belanda di Duri*, Skripsi Fakultas Sastra Unhas, Makassar.
- Anhar Gonggong, 1990. *Abdul Kahar Muzakkar dan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan tahun 1950-1960*, University Indonesia Jakarta
- Amirullah, 2001. *Gerakan Gerelya Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Bulukumba*, Skripsi Fakultas Sastra Unhas, Makassar.
- Anne Booth dkk, 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*, LP3S Jakarta.
- A. Samad Tahir, 1999. *Daerah Wisata di Indonesia "Sulawesi Selatan"* Dinas Pariwisata, Ujung Pandang.
- Asmira, 2000. *Tradisi Situs Batu Dalam Salassae di Kecamatan Bulukumpa*, Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Unhas, Makassar
- C. Van Timahi, 1981. *Darul Islam di Maserengpulu*, *... hal-hal yang berkaitan dengan sejarah*
- Depak, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Drillon dalam Sheyoputri A. 1994. *Analisis Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Tani, Sayur-sayuran di Kanreapie, Kec. Tionggi Moncong Gowa Sulawesi Selatan*, UP, Tesis Pascasarjana, Unhas, Makassar.

- Ilham, 1993. *Perdagangan kopra di Makassar tahun 1945-1960*. Skripsi Sarjana Un has, Fakultas Sastra, Makassar.
- Khaeruddin, 1992. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi Ekonomi dan Perencanaan*, Liberty Yogyakarta.
- Kuantowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Lantara S. Kabag. Pemerintah, 1960. *Catatan Singkat Pembentukan Kabupaten Bulukumba*, Bulukumba.
- Lewis Gottschalk, 1983. *Mengerti Sejarah* Diterjemahkan oleh Nugroho Noto Susantanto, University Indonesia Press Jakarta.
- L. Side Dg. Tapala, 1977. *Zaman Kebangkitan Nasional Sulawesi*.
- M.C. Ricklefs, 1974. *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pieter. Creutzberg dan J. R. M. Van Loanen, 1977. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Polinggomang Edward. L. 1991 *Proteksi dan Perdagangan Bebas, Kajian tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19*. (Amsterdam. Disertasi Axademish Proefschrift Erije Universiteit.
- 1993. *Sejarah Perkembangan Kolonial Rujukan Bagi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Bagian Timur*, Unhas Ujung Pandang.
- Sekitar 1900-1942, Depak, Ujung Pandang
- Surahamad, Dr. Winamo, 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Wasito Bandung.
- Syahruil Amar, 1992. *Kehidupan Nelayan Pembuat Perahu di Tana Lemo Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Fakultas Sastra Unhas, Makassar.
- Wahyuni, 1996. *Pembangunan Kabupaten Bulukumba Dalam Persp ektif Sejarah*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Unhas, Makassar.
- Yante Liaauw, 1998. *Dampak Praktek Jual Beli Kopra dari Sistem Jaminan Hasil Panen, terhadap Petani Kelapa di Kecamatan Misool Kabupaten Sorong*, Tesis Pascasarjana Unhas, Makassar.